WILAYAH FAQIH
(Pemikiran Politik Ayatullah Khomeini)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu
Ilmu Sejarah dan dan Kebudayaan Islam

Oleh :

ROSYIDA ASMAD
NIM : AO.2.3.95.114

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ADAB
JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
2000

Persetujuan Pembimbing Skripsi

Skripsi saudari Rosyida Asmad
telah diperiksa Dan disetujui
untuk diujikan

Surabaya, 22 juli 2000

Dosen Pembimbing,

Drs. M. Ridwan Abu Bakar
NIP 150 231 822

Pengesahan Tim Penguji Skripsi

Skripsi oleh Rosyida Asmad ini telah dipertahankan dihadapan penguji skripsi
Surabaya, 11 Agustus 2000

Mengesahkan Fakultas Adab

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan

Dr. H. Ali Mufrodj. MA.

NIP. 150203741

Ketua

Drs. M. Ridwan Abu Bakar

NIP. 150231822

Sekretaris

Drs. M. Zuhdi

NIP. 150249900

Penguji I

Drs. H. M. Azis Medan

NIP. 150221316

Penguji II

Drs. Nur Rokhim

NIP. 150243977

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAKSI.....	ix
BAB 1: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penelitian.....	11

BAB II : AYATULLAH KHOMEINI	13
A. Geneologi Ayatullah Khomeini	13
B. Latar Belakang Pendidikan Ayatullah Khomeini.....	16
C. Perjuangan Ayatullah Khomeini	20
D. Karya-karya Ayatullah Khomeini	34
BAB III : WILAYAH FAQIH (Pemikiran Politik Ayatullah Khomeini).....	48
A. Pengertian Wilayah Faqih	48
B. Latar Belakang Lahirnya Wilayah Faqih.....	52
C. Pemikiran Politik Ayatullah Khomeini.....	63
D. Institusi Wilayah Faqih : Model Pemerintahan Islam.....	72
BAB IV : P E N U T U P.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran.....	88
C. Penutup.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN	93
DAFTAR RALAT	94

تلخيص الرسالة

كتب التاريخ أن آية الله الخميني (روح الله المسافى الخميني) عالم من العلماء الشيعة. وهو ولد في ٢٤ سبتمبر ١٩٠٢م / ٢٠ جمادى الثانية وافق تاريخ ولادته بفاطمة الزهراء بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

نشأ الخميني في كنف العلماء الذين لا يعترف وجودهم حكومة بهليني. وهذا سوف يثر في لون فكرته وحركاته فيما بعد. فيحاول إنشاء الحكومة المعتمدة على العدالة والشريعة الإسلامية. ويلقى فكرة الحكومة الإسلامية ويطبقتها في العالم المعاصر.

وأشهر على كونه رجلاً سياسياً - بعالم كبير يستطيع أن يهيب روح المجتمع

ويثيرها. وعلى كونه رجلاً فقيهاً اشتهر بجراس الإيمان، وقد استعاد الروح الإسلامية في الظروف الإنحطاطية (dekaden) وكثرة الاخلاص وسيطرة الغرب على العرب.

وكان الغربيون يعدونه مسلماً متمزماً في الإسلام. ويراه المجددون الإسلاميون أسوة

لهم.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Syi'ah¹ adalah madzhab politik yang pertama lahir dalam Islam. Madzhab ini tampil pada akhir masa pemerintahan Utsman, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa Ali. Setiap kali Ali berhubungan dengan masyarakat, mereka semakin mengagumi bakat-bakat, kekuatan beragama, dan ilmunya. Karena itu para propagandis Syi'ah mengeksploitasi kekaguman mereka terhadap Ali untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka tentang dirinya.² Ketika keturunan Ali yang sekaligus keturunan Rasulullah mendapat perlakuan zalim yang semakin hebat dan banyak mengalami penyiksaan pada masa Bani Umayyah.³ Rasa cinta mereka terhadap keturunan Ali semakin mendalam, mereka memandang keturunan *ahlul*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

¹ Kata Syi'ah bermakna "pengikut" atau "penolong". Istilah ini diambil dari peristiwa historis masa lalu, yaitu ketika Utsman bin Affan terbunuh, yang mengakibatkan kaum muslimin terbagi menjadi dua golongan. Sebagian besar menjadi Syi'ah (pengikut) Ali dan sebagian kecil menjadi Syi'ah Muawiyah. Keterangan lebih lanjut baca Mustafa Muhammad asy-Syak'ah dalam bukunya, *Islam Tidak Bermadzhab*, terj. A.M Basamalah (Jakarta; Gema Insani Press., 1995), h.133.

² Sejalan dengan perkembangan zaman, istilah Syi'ah lebih dinisbahkan kepada kelompok pengikut Ali dan pemihakan kepada Ali berubah menjadi pengutamaan Ali dan anak cucunya, sehingga lambat laun muncul keyakinan bahwa khalifah dan kepemimpinan umat adalah hak mutlak bagi keturunan Ali. Demikian kata M.M. asy-Syak'ah (M.M. asy-Syak'ah, 1995, h.133).

³ Dinasti Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah dan kerajaan ini nerumur skitar 90 tahun dan di zaman ini merupakan penerus ekspansi yang sempat terhenti pada era dua khalifah terakhir. Sejarah mencatat diantara khalifah-khalifah besarnya antara lain Muawiyah ibn Abi Sofyan (661-680 M), Abd. Malik ibnu Marwan (685-705 M), dan Hisyam ibn Abd. Malik (724-743 M). Lihat Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta; UI-Press, 1985), h. 61.

bait itu sebagai syuhada dan korban kezaliman. Dengan demikian semakin luaslah daerah madzhab Syi'ah dan pendukungnya semakin banyak.⁴

Perkembangan Syi'ah yang paling pesat dan luas adalah di kalangan orang-orang Persia. Budaya mendewa-dewakan raja dan menganggapnya sebagai orang suci masih sangat kuat berakar di kalangan bangsa Persia waktu mereka menerima Islam. Melihat pola dan tradisi yang mereka kenal sejak zaman purba, tidak berlebihan kalau ada asumsi bahwa sepeninggal Nabi bagi mereka penggantinya harus dari keturunan atau keluarga Nabi. Alasan lain menurut suatu riwayat, konon Husain bin Ali telah memperistri seorang putri dari raja terakhir Persia, sebelum bangsa Persia masuk Islam.⁵

Dalam perjalanannya, terjadi perpecahan yang tidak bisa dihindari oleh Syi'ah, hal ini disebabkan oleh perbedaan prinsip dan doktrin yang berakibat timbulnya kelompok ekstrim (*al-ghulat*) dan kelompok moderat, karena perbedaan pendirian tentang siapa yang harus menjadi Imam sepeninggal Husain bin Ali, Imam ke-3, sesudah Ali Zainal Abidin, Imam ke-4, dan sesudah Ja'far Shaddiq, Imam ke-6. Perpecahan ini sendiri terbagi menjadi berpuluh-puluh kelompok, dan

⁴ Imam Muhammad Abu Zahroh, *Aliran Politik Dan Aqidah Dalam Islam*, terj. Abd Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib (Jakarta; Logos, 1996), h.34.

⁵ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara : Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta; UI-Press, 1993), h.211-212.

akhirnya muncul tiga golongan populer, yaitu Zaidiyah, Isma'iliyah. dan Itsna 'Asyariyah (Imamiyah).⁶

Yang terakhir (Itsna 'Asyariyah), merupakan kelompok Syi'ah yang paling besar pengikutnya dan sejak awal abad 14 M, (pada saat Isma'il Shafawi berkuasa di Iran) Syi'ah Itsna 'Asyariyah dijadikan agama resmi negara.⁷

Menurut kaum Syi'ah,⁸ Imam keduabelas, al-Mahdi al-Muntazhar, lahir pada tahun (225 H/869 M), dan sampai sekarang masih hidup, tetapi berada di alam gaib.⁹ Disamping itu, bagi mereka jabatan Imam adalah hak istimewa *ahl al-bait* (keluarga Nabi), yaitu Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Disini al-Muzafhar mengatakan: "Kami meyakini bahwa Imamah adalah salah satu dari ajaran Islam yang fundamental (ushul al-din) dan keyakinan seseorang tak pernah menjadi sempurna tanpa meyakini Imamah itu."¹⁰ Sejak pertama kali Nabi SAW mengajak

⁶ Sjadzali, *Islam*, h.212. Dikatakan Itsna 'Asyariyah, sebab mereka meyakini adanya Imam duabelas. Lihat S.H.M. Jafri, *Awal Dan Sejarah Perkembangan Syi'ah Dari Saqilah Sampai Imamah* (Bandung; Pustaka Hidayah, 1995), h.14, juga dalam Budhy Munawar - Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah* (Jakarta; Paramadina, 1995), h.16.

⁷ *Ibid*, h.214.

⁸ Maksud dalam pembahasan ini, yang dimaksud dengan Syi'ah adalah Syi'ah Imamiyah Itsna 'Asyariyah.

⁹ Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif*, (Bandung; Mizan, 1998), h.224. Faktor terpenting dalam perkembangan Syi'ah dalam Islam adalah gagasan seorang pemimpin mesianis (Imam) yang menjanjikan tamatnya korupsi dan kejahatan; akan kedatangan (juru selamat) Imam Mahdi, yang akan menegakkan pemerintahan yang adil, demikian ungkap Abdul Azis A. Sachedina (Mumtaz Ahmad, 1994:152). Bandingkan dengan Fazlur Rahman, *Metode Dan Alternatif: Neomodernisasi Islam* (Bandung; Mizan, 1992), h.116.

¹⁰ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta; Rajawali Press, 1994), h.202. *Ensiklopedi Islam* (Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeven, 1993)V.5, h.5-15.

orang pada Islam kata al-'Askari, "Beliau telah memikirkan dan merencanakan pelanjutnya. untuk menegakkan masyarakat Islam".¹¹

Ilustrasi di atas memberikan kontribusi pemahaman yang tidak begitu salah, bahwa Syi'ah muncul lewat polemik historis yang sarat dengan muatan politik atau juga pemahaman mereka terhadap pesan-pesan agama. A. Syarafudin al-Musawi (Ulama Syi'ah) sendiri mengakui bahwa tiada penyebab perpecahan diantara umat Islam yang lebih hebat dari pada perbedaan yang berhubungan dengan soal Imamah.¹²

Perkembangan pemikiran Syi'ah tentang Imamah dapat dibagi dalam dua tahap penting. *Pertama*, ketika para Imam mereka masih hidup. *Kedua*, pemikiran yang berlangsung setelah gaibnya Imam al-Mahdi. Pada masa yang kedua inilah kepemimpinan dilanjutkan oleh *para faqih*. Jadi jika para Imam berkewajiban membimbing umat setelah berakhirnya *siklus wahyu* artinya setelah wafatnya Rasul Allah yang terakhir, maka para faqih berkewajiban membimbing umat setelah berakhirnya *siklus Imamah*, dengan perbedaan bahwa fiqih tidak mempunyai sifat 'Ishmah.¹³

¹¹ Rahman, *Kontekstualisasi*, h.696.

¹² Ahmad Musawi, *Dialog Sunnah Syi'ah* (Bandung; Mizan, 1986), h.5.

¹³ Riza Sihbudi, "Bahasa Politik Dalam Syi'ah: Kasus Vilayat-i Faqih". *Islamika no. 5*, (Juli - September 1994), h.46-47.

Kembali pada Imamah, bagi M.Momen, dikalangan orang yang sudah kenal dengan Timur Tengah realita bahwa banyak pejuang Revolusi pada jaman awal Islam merupakan orang Syi'ah asli dan konsep bahwa aliran Syi'ah berpendapat bahwa seluruh kekuasaan politik yang tidak resmi di saat Imam yang gaib tidak hadir, menyebabkan timbulnya asumsi bahwa pejuang Revolusi melawan penguasa merupakan hal turun-temurun dalam ajaran Syi'ah. Selain itu Momen melanjutkan, beberapa ahli tentang Syi'ah dan Iran (pada era modern ini) menegaskan bahwa Ulama Syi'ah selalu memainkan peran oposisi guna mewakili keiginan masyarakat.¹⁴

Hal semacam ini secara mengejutkan dapat direalisasikan, bahwa lebih jauh (keyakinan akan otoritas tertinggi di tangan para faqih; pasca Imam) memunculkan kejadian paling dramatis di dunia Islam abad ini yaitu Revolusi Iran (1978-1979) dan penggulingan Syah Iran dari takhtanya.¹⁵ Argumentasi yang beredar, seperti halnya Ali Syariati (ideolog Revolusi Iran), Khomeini percaya bahwa gaibnya al-Mahdi tidak berarti berhentinya peran politik umat Syi'ah. Dalam rangka membangun masyarakat dan negara, kaum muslim tidak boleh menunggu sampai

¹⁴ RM. Burrel (ed.), *Fundamentalisme Islam*, terj. Yudian W. Asmin (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1995), h.83.

¹⁵ Keterangan lebih lanjut baca William Montgomery Watt, *Fundamentalisme Islam Dan Modernitas*, terj. Taufik Adnan Amal (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1997), h.259. John L. Esposito, *Islam Dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-masalah*, terj. Machnun Husein (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h.531.

kembalinya al-Mahdi, karena Islam dan politik tidak bisa dipisahkan, maka harus dibentuk pemerintahan Islam yang dipimpin oleh *para faqih*.¹⁶

Sementara itu, kepedulian faqih berkaitan dengan negara dan pemerintahan, dalam pandangan Bernard Lewis, "bukanlah pada abstraksi filosofis mengenaiya atau fenomenanya di dalam sejarah", meskipun jelas bahwa ia sadar akan kondisi ke- dua aspek itu. Seorang faqih melihat negara dan pemerintahan terutama sebagai perangkat yang bersifat sakral sebagai bagian yang niscaya dan inheren dari ketetapan atau takdir Tuhan yang telah diturunkan pada manusia.¹⁷ Pemerintahan yang berasal dari wilayah Nabi Muhammad, merupakan salah satu perintah utama dalam Islam. Otoritas mutlak seperti itu bahkan dapat membatalkan konstitusi.¹⁸

Bersamaan dengan sejarah pemahaman agama dan kronologi peristiwa politik yang panjang, maka terjadi pula tawar-menawar konsepsi pemerintahan negara yang Islami dengan solusi final melahirkan *Vilayat-i Faqih (Wilayah Faqih)*.¹⁹ Sebuah perkembangan besar dalam dimensi sistim politik Islam,

¹⁶ Sihbudi, "Bahasa Politik", h.47.

¹⁷ Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam*, terj. Ihsan Ali Fauzi (Jakarta; Gramedia, 1994).h.39

¹⁸ Ali Rahmena (ed.), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, terj. Ilyas Hasan (Bandung; Mizan, 1996), h.97.

¹⁹ Secara Teknis, Wilayah berarti pemerintahan (rule), supremasi atau kedaulatan. Wilayah menunjukkan kesetiaan kepada pemerintahan Imam dan mengakui hak Imam untuk memerintah (Mumtaz Ahmad, 1994:130). Bagi Jalaluddin Rahmat, Faqih adalah seorang muslim yang telah mencapai tingkat tertentu dalam ilmu kesalehan.

sedangkan sistim politik itu sendiri yaitu suatu konsepsi yang berisikan antara lain ketentuan-ketentuan tentang siapa sumber kekuasaan negara, siapa pelaksana kekuasaan tersebut; apa dasar dan bagaimana cara untuk menentukan kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu diberikan kepada siapa pelaksana kekuasaan itu bertanggung jawab dan bagaimana bentuk tanggung jawab.²⁰ Sementara Prof. Sumantri menggambarkan bahwa sistim politik sebagai suatu kelembagaan dari hubungan antara manusia, yang berupa hubungan antara supra struktur politik dan infra struktur politik.²¹ Bagaimanapun Wilayah Faqih merupakan konsepsi yang sama sekali baru, yang diantar oleh realitas historis dan politik sekalipun perwujudannya harus melalui media Revolusi. Lebih dari itu berbicara Wilayah Faqih, tak bisa lepas dari wacana (yang dianggap sebagai pencetus Wilayah Faqih) pemikiran Khomeini. Ayatullah Khomeini, beliau adalah tokoh Syi'ah yang lahir pada tanggal 24 September 1902, bertepatan dengan hari ulang tahun Fatimah putri Nabi Muhammad SAW.²² Khomeini berasal dari keluarga yang sangat religius. Didikannya dalam lingkungan agama, terhinakannya Ulama oleh Dinasti Pahlevi, matinya Islam sebagai kekuatan dunia, semuanya itu berpengaruh terhadap pemikirannya. Khomeini terlahir sebagai

²⁰ Sjadzali, *Islam*, h.2-3.

²¹ Ino Kencana Syafi'i, *Ilmu Politik* (Jakarta; Rineka Cipta, 1997), h. 10. David Eston menyatakan bahwa sistim politik dapat diperkenalkan sebagai seperangkat interaksi yang diapstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. Lihat Harianto, *Sistim Politik Suatu Pengantar* (Yogyakarta; Liberti, 1982), h.2.

seorang Syi'ah yang dalam ajarannya tidak mengenal adanya pemisahan antara agama dan politik ..Setelah lama mengalami kevakuman kepemimpinan dalam hirarki kepemimpinan Syi'ah setelah *masa gaib besar*,²³ dan didukung dengan kondisi sosial-politik -Khomeini menduduki posisi *Marja' Taqlid* (sebagai tempat panutan umat Syi'ah Imamiyah)- Khomeini melontarkan ide-idenya tentang perlunya seorang faqih memegang tampuk pemerintahan (Wilayah Faqih), guna mencapai pemerintahan yang adil berlandaskan hukum Tuhan.

Dari sini, penulis ingin memaparkan pemikiran Khomeini tentang Wilayah Faqih, sebagai sebuah pemikiran yang telah teraplikasi ke dalam sistim politik Islam yang oleh kebanyakan juris di anggap mapan dan Islami degan menganalisa sejarah, tujuan dan esensi formal daru Wilayah Faqih itu sendiri.

B. RUMUSAN MASALAH

Masalah studi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Khomeini tentang Wilayah Faqih ?
2. Apa sebab-sebab kemunculannya ?

²³ Kegaiban tebagi dalam dua tingkatan. Pertama masa "Gaib Kecil", yaitu ketika Imam Mahdi "bersembunyi" di dunia fisik dan mewakilkan kepemimpinannya kepada para Wakil Imam. Pada masa ini, kesulitan dalam hal marja' (kepemimpinan agama dan politik) relatif bisa diatasi, karena posisi marja' "dijabat" oleh empat wakil al- Mahdi. Kedua adalah apa yang disebut sebagai masa "Gaib Besar", yaitu masa sesudah meninggalnya keempat wakil Imam sampai kedatangan kembali Al Mahdi pada akhir zaman. (Sihbudi, "Bahasa Politik", h.46).

C. TUJUAN PENELITIAN

Kajian penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendiskripsikan pemikiran Khomeini tentang Wilayah Faqih (yang tertuang dalam konstitusi Republik Islam Iran).
2. Menganalisa pemikiran Khomeini tentang Wilayah Faqih

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk :

1. Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang Wilayah Faqih pemikiran politik Ayatullah Khomeini.
2. Dapat dijadikan referensi pertimbangan pemecahan permasalahan khususnya dalam sistim pemerintahan dan negara Islam.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah pemikiran politik Ayatullah Khomeini tentang Wilayah Faqih, yang merupakan gagasan besarnya yang tertuang dalam konstitusi Republik Islam Iran. Dengan demikian, lingkup dari penelitian ini adalah mengesampingkan pasal-pasal dalam konstitusi yang tidak berkaitan langsung dengan Wilayah Faqih.

F. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan adalah metode historik (sejarah), sesuai dengan langkah yang diambil dalam keseluruhan prosedur.

Adapun langkah-langkah dalam metode historik meliputi :

1. Heuristik

Yaitu: mengumpulkan data dan sumbernya.¹ Maksudnya kegiatan mengumpulkan data-data yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sumbernya yaitu berupa sumber kepustakaan (literatur) baik dari buku maupun jurnal yang ada kaitannya dengan skripsi ini. Dalam hal ini karena sulitnya mendapatkan sumber-sumber asli, maka penulis menggunakan sumber turunan di samping sumber asli yang telah tersedia.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Kritik Data

Yaitu, merupakan bentuk kegiatan mengevaluasi sumber-sumber data yang dibutuhkan. Kritik data ada dua :

- a. Kritik ekstern, yang merupakan suatu usaha mengadakan penelitian tentang asli atau tidaknya sumber.

¹ Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1987), h.36.

- b. Kritik intern, yang bertalian dengan persoalan apakah sumber itu dapat memberikan informasi yang kita butuhkan.²

3. Interpretasi

Yaitu, kegiatan untuk menetapkan sesuatu atau memberi makna yang berhubungan di antara fakta-fakta yang telah diperoleh.³

4. Historiografi

Yaitu, tahap akhir dalam kerja kesejarahan yang merupakan sintesa yang diperoleh dalam bentuk kisah.⁴

G. SISTIMATIKA PEMBAHASAN

Sistimatika pembahasan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, dan sistimatika pembahasan.

BAB II : Berisi tentang Biografi Ayatullah Khomeini, yang dalam pembahasannya meliputi geneologi Ayatullah Khomeini, latar belakang pendidikan, perjuangan, dan karya-karyanya.

² Notosusanto, *Masalah Penelitian*, h.38.

³ *Ibid*, h.40.

⁴ *Ibid*, h.42.

BAB III :Mengenai Wilayah Faqih pemikiran Ayatullah Khomeini, pembahasannya meliputi pengertian Wilayah Faqih, latar belakang lahirnya Wilayah Faqih, pemikiran politik Ayatullah Khomeini dari sebelum munculnya ide Wilayah Faqih sampai munculnya ide Wilayah Faqih beserta maksud dari Wilayah Faqih itu sendiri, yang terakhir tentang Institusi Wilayah Faqih Model Pemerintahan Islam, yaitu pelebagaan Wilayah Faqih sebagai sebuah model pemerintahan Islam-nya Ayatullah Khomeini yang tertuang dalam Konstitusi Republik Islam Iran.

BAB IV :Penutup dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran serta kata penutup.

BAB II

AYATULLAH KHOMEINI

A.GENELOGI AYATULLAH KHOMEINI

Ayatullah al-Uzma Sayyid Ruhullah al-Musavi al-Khomeini¹ dilahirkan di kota Khumayn,² pada tanggal 24 september 1902 M (20 Jumadi Tsani 1320 H) bertepatan dengan kelahiran Fatimah putri Nabi Muhammad SAW dan isteri Ali bin Abi Thalib (Imam Syi'ah pertama).³

Ia berasal dari sebuah keluarga Sayyid, yang mengaku sebagai keturunan dari Musa al-Kazim, Imam ketujuh dari duabelas Imam Syi'ah.⁴ Mereka dikenal sebagai keluarga yang sangat religius. Ayahnya, Sayyid Mustafa al-Musavi al-Khomeini,

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

¹ Ayatullah al Uzma merupakan gelar yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang Ulama terkemuka dalam masyarakat Syi'ah Itsna 'Asyariyah. Lihat *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994) V.3, h.53. Sedangkan "Sayyid" menunjukkan adanya garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Sihbudi, *Biografi*, h.36. Ruhullah al-Musawi merupakan nama asli dari Khomeini. Ibid, *Ensiklopedi Islam*. Di Iran memang ada semacam tradisi menggunakan nama kota/daerah sebagai nama orang, biasanya dengan menambah akhiran "I", contoh lain : Rafsan menjadi Rafsanjani, Teheran menjadi Teherani. (Ibid, *Biografi*).

² Khumayn, dahulu adalah sebuah dusun keil di Iran tengah, dekat Isfahan, sekitar 300 km selatan Teheran. Ali Rahnama (ed.), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, terj. Ilyas Hasan (Bandung; Mizan, 1996), h.69. Lihat Sihbudi, *Biografi*, h.36.

³ Sihbudi, *Biografi*, h.36. Lihat John L. Esposito, *Dinamika Kebangunan Islam*, terj. Bakri Siregar (Jakarta; Rajawali Press, 1987), h.180. Dalam bukunya "Rahnama, *Para Perintis*" menyebutkan bahwa Khomeini lahir 24 Oktober 1902, h.69.

⁴ Hamid Algar - Robin W. Carlsen, *Mata Air Kecemerlangan*, terj. Zainal Abidin (Bandung; Mizan, 1995), h.61

kakeknya Sayyid Ahmad Hindi, maupun kakek ayahnya, Sayyid Din Ali Syah, dikenal sebagai tokoh-tokoh agama yang disegani pada masanya. Begitu pula kakek dari ibunya, (Hajar Agha Khanom), Ayattullah Aqa Mirza Ahmad Khawansari. Sayyid Din Ali Syah adalah cendekiawan muslim dari Nishapur atau Nesyhabur (Iran Timur Laut) yang bermigrasi ke Khasmir dimana kemudian ia menetap untuk selamanya. Anaknya Sayyid Ahmad Hindi, mengembara ke Karbala dan Najaf, (dua kota suci umat Islam Syi'ah Irak) untuk memperdalam pengetahuan agama.⁵ Saat di Najaf, ia bertemu dengan Yusuf Khan, seorang pemuka masyarakat di Khumayn. Yusuf Khan meminta agar Sayyid Ahmad menyertainya ke Khumayn untuk diberi tanggung jawab memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakatnya. Sayyid Ahmad memenuhi permintaan itu dan kemudian ia menikah dengan anak Yusuf Khan yang bernama Sakinah⁶ dan memperoleh dua orang anak yaitu Sahiba dan Musthafa al-Musavi.⁷ Anak laki-lakinya, Sayyid Mustafa al-Musavi, baru berusia 8 tahun ketika Sayyid Ahmad meninggal dunia. Sayyid Mustafa mendalami pengetahuan agama di bawah bimbingan Ayatullah Aqa Mirza Ahmad Khawansari dan kemudian menikah dengan anak Mirza Ahmad, Hajar Aqa Khanom.

⁵ Sihbudi, *Biografi*, h.37.

⁶ Rahnema, *Para Perintis*, h.70.

⁷ Algar, *Mata Air*, h.62. Pada sumber lain menyebutkan bahwa Sayyid Ahmad dikaruniai empat orang anak, seorang laki-laki yaitu Sayyid Mustafa al-Musawi dan tiga orang perempuan. Lihat Sihbudi, *Biografi*, h.37 dan Rahnema, *Para Perintis*, h.70.

Pada 1903, ayah Ruhullah Khomeini meninggal dunia pada usia 42 tahun. Kabarnya, Sayyid Mustafa di bunuh oleh dua orang bernama Ja'far Quli Khan dan Ridha Quli Sultan, agen-agen rezim Dinasti Qajar (yang berkuasa dari 1796-1926 M), Sayyid Mustafa sedang dalam perjalanan menuju ibukota propinsi Arak, menemui gubernur Adhur al-Sultan, guna melaporkan situasi yang tidak aman di kota Khumayn. Jenazah Sayyid Mustafa segera di bawa ke Najaf. Para Ulama di Teheran, Arak, Isfahan, Golpaygan dan Khumayn, mengadakan upacara untuk mengenang kematian Sayyid Mustafa.

Di bawah tekanan rakyat, rezim Syah Muzaffar al-Din (1896-1907 M) dari Dinasti Qajar, berjanji akan menghukum para pembunuh Sayyid Mustafa. Tapi salah seorang pembunuhnya, Ridha Quli Sultan, tewas sebelum dipenjarakan, sedang Ja'far Quli Khan tidak lama di penjara, karena pada 1905 ia di eksekusi atas perintah Putra Mahkota Muhammad Ali Mirza ketika Syah sedang melawat ke Eropa. Pada umumnya, surat kabar-surat kabar waktu itu menuduh Syah sebenarnya berada di belakang pembunuhan Sayyid Mustafa.⁸

Sayyid Mustafa meninggalkan tiga putra, Sayyid Murtadha (lebih di kenal sebagai Ayatullah Pasandideh), Sayyid Nur al-Din (meninggal tahun 1976 di Teheran) dan Ruhullah Khomeini, yang waktu itu berumur 5 bulan.⁹ Sepeninggal ayahnya,

⁸ Sihbudi, *Biografi*, h.37-38.

Khomeini berada di bawah asuhan ibunya dan bibinya (Sahiba). Mereka atas saran Aqa Sayyid Muhammad Khamreh'i (menantu Sayyid Mustafa), memutuskan kembali ke Khumayn.

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN AYATULLAH KHOMEINI

Ayatullah Khomeini memulai pendidikannya di Maktabah Khameh (sekolah tradisional untuk anak-anak) milik Akhund Mullah Abu al-Qasim, yang tidak jauh dari rumahnya. Pada usia 7 tahun ia belajar bahasa Arab di bawah bimbingan saudara sepupunya, Syeikh Ja'far, dan seorang guru bernama Mirza Mahmud. Kemudian ia mempelajari Jami' Muqaddimat (buku teks tentang logika dan tata bahasa Arab) di bawah bimbingan pamannya, Haji Mirza Muhammad Mahdi.

Untuk mempelajari ilmu logika dan sintaksis (Ilmu Nahwu / kalimat) bahasa Arab, Ruhullah Khomeini belajar pada kakak kandungnya, Ayatullah Sayyid Murtadha Pasandideh, dan kakak iparnya, Haji Mirza Ridha Najaf. Bersama Aqa Hamzah Mahalati, Ayatullah Pasandideh mengajarkan kaligrafi (Khatt-e Nasta'liq). Ayatullah Pasandideh mempunyai peranan sangat besar dalam perjalanan hidup Ayatullah Khomeini. Ketika Ruhullah Khomeini baru berusia 16 tahun, ibunya

⁹ Algar, *Mata Air*, h.65. Sedang pada sumber lain menyebutkan bahwa Sayyid Mustafa dikaruniai enam orang anak, Khomeini adalah anak bungsu dan Sayyid Mustafa meninggal saat Khomeini berumur 7 bulan (Rahnema, *Para Perintis*, h.70).

meninggal dunia dan tidak lama kemudian menyusul bibinya. Sejak saat itu ia berada di bawah asuhan Ayatullah Pasandideh.

Pada 1920, Ayatullah Khomeini pergi ke Arak untuk melanjutkan studinya. Disana ia di bimbing oleh Ayatullah Syaikh Muhammad Golpaygani dan Ayatullah Aqa Abbas Araki. Pada waktu itu yang menjadi cendekiawan terkemuka di Arak adalah Ayatullah Syaikh Abdul Karim Ha'iri (meninggal 1937 M).¹⁰ Sekitar setahun setelah kedatangan Ruhullah Khomeini di Arak, Ha'iri menerima undangan dari masyarakat dan para Ulama Qum untuk tinggal di sana.¹¹ Pada 1922, Ayatullah Ha'iri pindah ke Qum¹² dan menetap selamanya di kota ini dan mendirikan Hauzah Ilmiah.¹³

Empat bulan setelah Ha'iri meninggalkan Arak, Khomeini muda mengikutinya, dan tinggal di madrasah Dar al-Syifa'. Salah seorang guru pertama Khomeini di tempat tinggalnya yang baru adalah Muhammad Reza Masjed Syahi. Dari Syahi inilah ia belajar retorika dan syair.

¹⁰ Sihbudi, *Biografi*, h.38-39.

¹¹ Algar, *Mata Air*, h.68.

¹² Qum, adalah kota terpenting di Iran yang terletak lebih kurang 150 km di sebelah selatan Teheran, Ibukota Iran. (*Ensiklopedi Islam*, V.2, h.131).

¹³ Haizah Ilmiah, adalah istilah bagi pola/metode pendidikan agama tradisional di lingkungan masyarakat Syi'ah, baik di Iran maupun Irak, yang masih dipertahankan hingga kini, (*Ensiklopedi Islam*, V.3, h.53).

Ruhullah menyelesaikan studi fiqh dan ushul dengan seorang guru dan Kasyan, yaitu Ayatullah Ali Yasrebi Kasyani (meninggal 1959 M). Kemudian mengikuti kelas Ha'iri. Ha'iri mengajar Dars-e Kharej (studi di luar teks). Pada tingkat ini tidak ada buku pegangan, para siswa berupaya membentuk pendapatnya sendiri mengenai soal-soal hukum. Inilah tahap final pendidikan Ruhullah. Dan Pada 1926, ketika Reza Khan mengalahkan orang-orang Qajar dan mendirikan Dinasti Pahlevi, Khomeini menjadi seorang *mujtahid*.¹⁴ Ia menerima ijazah untuk menyampaikan Hadits dari empat guru terkemuka. Yang pertama dari keempat guru itu adalah Muhsin Amin 'Ameli (meninggal 1952 M), Ulama terkemuka dari Libanon. Kedua, Syaikh Abbas Qumi (meninggal 1959 M) ahli Hadits terkemuka dan sejarawan Syi'ah. Ketiga, Abul Qasim Dehkardi Isfahani (meninggal 1934 M) beliau adalah Ulama terkemuka di Isfahan pada waktu itu. Guru keempatnya adalah Muhammad Reza Masjed Syahi (meninggal 1943 M).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sembari studi hukum dan fiqh di Qum, Khomeini juga mempelajari dua tradisi Islam yang tidak lazim yaitu Irfan (tasawwuf) dan Hikmah (filsafat), yaitu studi-studi yang berhubungan dengan penyerapan kebenaran tertinggi secara rasional

¹⁴ Sihbudi, *Biografi*, h.40. Mujtahid adalah seorang ahli hukum yang mengkonsentrasikan secara penuh pemikirannya untuk membentuk suatu pendapat dalam suatu kasus hukum (mengenai suatu hal yang masih diragukan dan menjadi perselisihan). Abdul Azis A. Sachedina, *Kepemimpinan Dalam Islam Perspektif Syi'ah*, terj. Ilyas Hasan (Bandung; Mizan, 1994), h.12. Lihat *Ensiklopedi Islam Ringkas* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996), h.283.

dan gnostik¹⁵ yang telah lama berkembang di kalangan Syi'ah. Guru pertamanya adalah Mirza Ali Akbar Yazdi, seorang murid Hadi Sabzawari (meninggal 1872 M), pengarang termasyhur buku *Syarh'i Manzuma*, salah satu teks dasar Irfan. Yazdi meninggal setelah tidak begitu lama kedatangan Khomeini di Qum. Guru lainnya adalah Mirza Aqa Javad Maliki Tabrizi (meninggal 1924 M), yang telah mengajar di Qum sejak tahun 1911. Ia menangani dua kelas, filsafat dan etika (akhlaq), yang dihadiri oleh pelajar-pelajar berbakat dan disukainya termasuk Khomeini muda. Ia juga belajar dari Sayyid Abul Hasan Rafi'i Qazwini (meninggal 1975 M). Guru utamanya dalam tasawwuf adalah Ayatullah Muhammad Ali Syahabadi (meninggal 1950 M), Khomeini mendengarkan Syahabadi mendiskusikan *Syarh-i Fushush*, sebuah komentar terhadap karya Ibnu Arabi, *Fushush al-Hikam* yang di tulis oleh Syafruddin Daud Qaysari (meninggal 1350 M) juga *Miftah al-Ghayb* oleh Shadr al-Din Qunawi (meninggal 1927 M), dan *Manazil al-Sa'irin* oleh Khwaja Abdullah Anshari (meninggal 1088 M)¹⁶

Meskipun dalam tradisi Syi'ah, Irfan dan Hikmah memiliki akar yang dalam, ilmu ini hanya dipelajari sesekali saja dalam lembaga keagamaan dan seringkali justru menjadi sasaran kecaman keras. Akan tetapi Khomeini tak bergeming dengan kecaman tersebut.

¹⁵ Gnostik yaitu pengetahuan mistis dunia bathiniyah manusia yang mengupayakan keakraban dengan Allah. (Rahnema, *Para Perintis*, h. 740).

¹⁶ Algar, *Mata Air*, h. 70-71.

Sebagai otodidak yang berbudi luhur, Ayatullah Khomeini selalu menekankan pelaksanaan kewajiban-kewajiban agama dan ketaqwaan pada prinsip-prinsip agama Islam. Dengan pemahaman tentang ilmu pengetahuan rasional dan ilmu pengetahuan tradisional yang mendalam, di usianya yang ke-27 Khomeini mulai mengajar Hikmah (filsafat). Khomeini juga menunjukkan bakat khususnya di bidang studi Irfan dengan menulis sebuah buku tentang Irfan dalam bahasa Arab. Irfan dan puisi yang diminati Ayatullah Khomeini sebenarnya kurang populer di kalangan Mullah¹⁷ di Qum pada masa itu. Pada usia 30 tahun Ayatullah Khomeini menikah dengan puteri seorang Ayatullah dari Teheran yang bernama Batul. Mereka dikaruniai lima anak, dua putra dan tiga putri.¹⁸

C. PERJUANGAN AYATULLAH KHOMEINI

Pada usia 27 tahun, Khomeini memasuki politik¹⁹ Ulama dan mulai memiliki kelompok pelajar yang mengaguminya. Perhatian Khomeini kepada Filsafat dan Irfan, tidak menghalangi perhatiannya kepada apa yang sedang berlangsung di Qum

¹⁷ Mullah adalah gelar yang diberikan kepada ahli ilmu agama. Kata ini berasal dari kata Arab "maula" yang berarti penuntun, guru, dan guru kepercayaan. Lihat *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta; Djembatan, 1992), h.688-689.

¹⁸ Sihbudi, *Biografi*, h.39. Sedangkan dalam bukunya *Rahnema*, menyebutkan bahwa Khomeini menikah pada usia 27 tahun.

¹⁹ Kata politik berasal dari kata politic (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Menurut Deliar Noer, politik adalah segala aktifitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat. Deliar Noer, *Pengantar Kepemikiran Politik* (Jakarta; Rajawali, 1983), h.5

dan di dalam negeri pada umumnya. Didorong oleh apa yang dilihatnya sebagai kemunduran moral di Iran, pada 1930-an dia mulai mengajar etika. Di kemudian hari dia mengatakan betapa selama periode ini orangpada egois, lemah, dan melempem, sehingga mereka tak mampu menghadapi kediktatoran Reza Syah.²⁰

Khomeini memberikan kuliah di Madrasah Faiziyah²¹ Qum. Khomeini memilih berceramah pada hari Kamis dan Jum'at, ketika beribu-ribu peziarah berdatangan ke kota ini. Banyak orang berdatangan dari kota-kota dan dusun sekitarnya. Bahkan dari Teheran, hanya untuk mendengarkan ceramahnya. Pihak berwenang segera melihat bahwa Khomeini merupakan ancaman bagi pemerintah, lalu mereka berupaya agar Khomeini tidak memberikan ceramah di Madrasah Faiziyah. Mereka mulai melakukan penekanan atas diri Khomeini, sehingga Khomeini terpaksa memindahkan ceramahnya dari Faiziyah ke Madrasah Haji Mullah Sadeq yang lebih jauh²²

Karena adanya tekanan sesama Ulama, akhirnya Khomeini tidak memberikan ceramah umumnya. Akan tetapi ia aktif menulis, mengecam kebijakan-kebijakan Syah, karya politik pertamanya *Kaysf al-Asrar* (menyingkap rahasia) yang di terbitkan tahun 1941, dimana ia mengecam pemerintahan Reza Syah, dengan

²⁰ Rahnema, *Para Perintis*, h.81.

²¹ Madrasah Faiziyah adalah sebuah asrama para pelajar agama yang sekaligus sebagai salah satu pusat kajian Islam di Qum. Bangunan tua yang dibangun sejak Dinasti Shafawi ini terletak di samping makam Fatimah Ma'sumah (*Ensiklopedi Islam*, V.2, h.132).

²² Rahnema, *Para Perintis*, h.82.

menegaskan bahwa sebuah monarki seharusnya dibatasi oleh aturan-aturan dalam syari'at sebagaimana ditafsirkan para *Mujtahid*.²³ Dalam hal ini ia menyepakati bentuk monarki konstitusional, tidak seperti yang dikehendaki Syah yaitu Monarki Absolut. Di samping itu *Kasyfal-Asrar* juga berisi tentang bantahan terhadap tulisan Ahmad Kasravi yang anti Ulama.

Ayatullah Khomeini walaupun merupakan bagian dari oposisi yang keras terhadap Syah Pahlevi, akan tetapi dalam hal aktifitas politik, Khomeini mengikuti Burujirdi selaku *Marja' Taqlid*²⁴ pada saat itu. Pada 1949 Burujirdi mengadakan pertemuan para Ulama dan mendesak mereka agar mengundurkan diri dari gelanggang politik. Burujirdi bekerja sama dengan monarki untuk mempertahankan hukum dan ketertiban.²⁵ Hubungan antara Ulama dan penguasa saat itu hampir tidak ada masalah. Para Ayatullah terkemuka termasuk Ayatullah Burujirdi, Ayatullah Ja'far Behbihani, dan Ayatullah Kasyani, secara diam-diam mendukung kudeta militer 1953 yang dilakukan oleh Mossadeq.²⁶

²³ Riza Sihbudi, "Tinjauan Teoritis dan Praktis atas Konsep Vilayat-i Faqih Sebuah Studi Pengantar", *Ulumul Qur'an* (no.2, V. IV, 1993), h.75.

²⁴ Marja' Taqlid, yaitu otoritas yuridis yang sangat alim dalam umat Imamiyah. Fatwa-fatwanya mengenai Syari'at diikuti oleh mereka dan mendasarkan praktek keagamaan mereka pada fatwa-fatwanya. Sachedina, *Kepemimpinan*, h.12.

²⁵ Esposito, *Dinamika*, h.183.

²⁶ Sihbudi, *Biografi*, h.41.

Bulan madu pendek antara Syah dan Ulama berakhir ketika Syah mulai mengajukan rancangan undang-undang Land Reform (Reformasi Tanah) pada 1959. Pada 23 Februari 1960 Burujirdi mengirim surat kepada Behbihani, salah satu anggota majelis yang menyatakan dengan tegas penentangannya terhadap rancangan undang-undang Land Reform. Untuk menghindari terjadinya konflik dengan Burujirdi, pemerintah mencabut kembali rancangan undang-undang itu.²⁷

Selama periode kepemimpinan Ayatullah Husain Burujirdi di kota suci Qum, Ayatullah Khomeini tidak secara langsung melibatkan diri dalam kegiatan politik. Tetapi sejak meninggalnya Burujirdi 19 Maret 1962, melalui kuliah-kuliah yang diberikannya, Ayatullah Khomeini mulai secara terbuka mengkritik pemerintah.²⁸

Meninggalnya Burujirdi menciptakan kekosongan kepemimpinan di dalam hirarki umat Syi'ah. Sejumlah Ulama penting, Muhammad Hadi Milani di Mashad Kazim Syari'atmadari di Tabriz, Muhsin Hakim di Najaf (Irak), serta Golpaygani dan Ruhullah Khomeini di Qum berkompetis, guna menggantikan posisi Burujirdi sebagai *Marja' Taqlid*. Syah mencoba mempengaruhi proses seleksi tersebut. Ia berharap agar pusat Syi'ah dipindahkan dari Qum ke Najaf, dan agar seorang Ayatullah non-Iran yang kurang dikenal -dengan sendirinya juga kurang mempunyai perhatian terhadap politik dalam negeri Iran- yang duduk sebagai pemimpin tertinggi

²⁷ Sihbudi, *Biografi*, h.42.

²⁸ *Ibid*, h.43.

masyarakat Syi'ah. Pilihan Syah waktu itu jatuh pada Ayatullah Muhsin Hakim di Najaf. Namun, keinginan Syah itu tidak dapat diwujudkan karena justru Ayatullah Khomeini yang kemudian terpilih sebagai *Marja' Taqlid*, dan dengan demikian Qum masih menjadi pusat Syi'ah, juga dalam perkembangannya, para Ayatullah senior tersebut justru memilih untuk bersatu dalam melawan rezim Syah.²⁹

Pada Januari 1963, di Madrasah Faiziyah, Ayatullah memberikan khutbah yang memprotes keras kebijakan Syah mengenai program Land Reform dan emansipasi wanita, yang dikenal dengan nama program Revolusi Putih.³⁰ Menurut Ayatullah Khomeini, kebijakan Syah di bidang pertanahan justru akan menghancurkan secara total ekonomi agraris di Iran, selain itu kebijakan tersebut juga akan membuat rakyat menjadi budak-budak sejumlah konglomerat yang didominasi keluarga kerajaan, sekelompok orang-orang kaya dan perusahaan-perusahaan asing. Ayatullah Khomeini juga berpendapat bahwa emansipasi wanita yang diterapkan oleh Syah justru akan merendahkan martabat wanita itu sendiri, dan akan menciptakan kemerosotan moral masyarakat.³¹ Akibat sikapnya itu, untuk pertama kalinya Khomeini ditahan pada 25 Januari 1963. Tak lama kemudian

²⁹ Sihbudi, *Biografi*, h. 44.

³⁰ Mengenai "Revolusi Putih", keterangan lebih lanjut lihat Riza Sihbudi, *Dinamika Revolusi Islam Iran*, (Jakarta; Pustaka Hidayah, 1989), h.23-24. bandingkan dengan Ghufuran A. Mas'adi, Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, V.3, terj. Ghufuron A. Mas'adi (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1994), h.53-56.

³¹ *Ensiklopedi Islam*, V.3, h.54.

Khomeini dibebaskan. Namun, penahanan itu tidak membuatnya jera dalam mengecam penguasa.

Di bulan Maret, ketika berlangsung peringatan ulang tahun syahidnya Imam Ja'far, Imam ke-6, Madrasah Faiziyah diserang oleh SAVAK (Sazman e Etlaat Va Amniyat Keshavar atau organisasi informasi dan keamanan wilayah). Sejumlah siswa meninggal dan ada yang terluka. Ayatullah Khomeini dijebloskan ke dalam penjara. Akan tetapi tidak lama kemudian Ayatullah dibebaskan.

Pada 3 Juni 1963, Ayatullah Khomeini dalam pidatonya mendeklarasikan perang terhadap Syah. Esoknya, sewaktu berlangsung peringatan ulang tahun syahidnya Imam Husain, rezim Syah -untuk ketiga kalinya- menangkap Ayatullah Khomeini di Qum. Ketika berita ditangkapnya Khomeini sampai di Teheran, prosesi peringatan ulang tahun syahidnya Imam Husain berubah menjadi demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi itu meluas sampai ke Shiraz, Kasyan dan Mashad. Kendati di bawah tekanan pihak militer, demonstrasi terus berjalan hingga hari Jum'at 17 Juni (17 Khurdad), dimana ditemukan sebuah pamflet yang menyerukan jihad terhadap rezim Syah. Beberapa hari kemudian demonstrasi baru bisa dipadamkan dengan jatuhnya korban ratusan jiwa.

Syah melemparkan tuduhan -tanpa bukti- bahwa Ayatullah Khomeini menjalin kontak langsung dengan Gamal Abdul Nasser (presiden Mesir waktu itu), salah satu musuh Syah. Klimaks dari peristiwa ini adalah terjadinya gerakan 5 Juni

1963 di Teheran. Kaum demonstran dalam jumlah sangat besar turun di jalan-jalan sambil membawa gambar-gambar Ayatullah Khomeini serta meneriakkan slogan-slogan anti-Syah. Sejumlah demonstran mengenakan kain kafan yang menandakan kesiapan mereka untuk mati syahid.

Gerakan oposisi kaum Ulama terus berlanjut hingga sesudah Juni 1963. Ayatullah Khomeini baru dibebaskan pada Agustus 1963, tapi 5 November 1963 untuk keempat kalinya Ayatullah kembali ditahan karena menyerukan kepada pengikutnya untuk memboikot pemilu anggota parlemen Oktober 1963, sejumlah tokoh Ulama seperti Syari'atmadari, Najafi Marashi dan Montaziri, secara bersamaan melancarkan kampanye yang efektif bagi pembebasan Ayatullah Khomeini. Empat pekan setelah dipenjara, Ayatullah Khomeini dibebaskan, tetapi tidak diperbolehkan kembali ke Qum, dan berada dalam status tahanan rumah di Teheran.³²

Ayatullah Khomeini diperbolehkan kembali ke Qum oleh pihak pemerintah pada tanggal 7 Maret 1964. Ketika kembali ke Qum, Ayatullah Khomeini tidak lagi di pandang sebagai salah seorang Ayatullah terkemuka semata, namun juga sebagai Ayatullah pemimpin politik.

Pada tanggal 27 Oktober 1964, Ayatullah kembali melancarkan aksi melalui pidato yang disampaikannya, sebagai bentuk protes dan ekspresi reaksi masyarakat terhadap pengesahan undang-undang mengenai kekebalan personil militer Amerika

³² Sihbudi, *Biografi*, h.45-48.

di Iran. Dalam pidatonya Ayatullah Khomeini menilai bahwa konsesi yang telah diberikan Syah kepada Amerika itu telah menghina rakyat Iran dan kaum muslimin secara umum.³³

Untuk yang kelima dan terakhir kalinya, Ayatullah Khomeini ditahan dan kemudian diasingkan ke Bursah, sebuah kota kecil di Turki. Sesampainya di Turki pada tanggal 4 November 1964, Ayatullah Khomeini berada dalam suasana terisolir total. Sekulerisme Turki dan kenyataan bahwa kaum Syi'ah merupakan minoritas di negeri ini membuat Ayatullah Khomeini terbatas ruang gerakannya. Disamping itu, hukum di Turki melarang dikenakannya pakaian keagamaan (seperti jubah dan surban). Baik Ayatullah Khomeini maupun Mustafa Khomeini (putra sulung Ayatullah) dianjurkan mengenakan pakaian Eropa atau tetap tinggal di rumah. Keadaan seperti itu membuat Ayatullah tidak betah berlama-lama tinggal di Turki.

Ayatullah kemudian mengajukan izin untuk pindah ke Najaf (Irak). Duta besar Irak di Teheran menyetujuinya.

Ayatullah Khomeini pindah ke Najaf pada Oktober 1965, beliau tinggal di dekat makam Imam Ali beserta keluarganya. Ia bertemu dengan para Ulama Najaf, antara lain Ayatullah Kho'i, Muhsin al-Hakim dan Shiraz. Selama di Najaf Ayatullah Khomeini terus memperdalam pengetahuannya. Ia membaca dengan penuh perhatian buku-buku yang ditulis kaum muslim pembaharu seperti, Syaikh Muhammad Abduh

³³ Rahnema, *Para Perintis*, h.92.

dan Hassan al-Banna pendiri Ikhwanul Muslimin. Ia membaca sebanyak mungkin buku-buku berbahasa Arab yang tidak di perolehnya selama berada di Iran, karena rezim Syah melarang masuknya buku berbahasa Arab.³⁴

Diantara kendala yang dihadapi Ayatullah Khomeini selama di Najaf yaitu pembatasan aktifitas politik pemerintah Baghdad, serta adanya ketidak cocokkan antara tokoh Ulama Syi'ah Irak Ayatullah Muhsin al-Hakim berkaitan dengan aktifitas politik Ayatullah Khomeini. Namun kemudian al-Hakim mendukung sikap Ayatullah Khomeini. Sebaliknya menurut Moojan Momem, Ayatullah Kho'i yang menggantikan posisi al-Hakim sebagai marja' bagi umat Syi'ah Irak, justru menentang aktifitas politik Ayatullah Khomeini.³⁵

Selama di Najaf, kontak Ayatullah Khomeini dengan negaranya tidak terbatas hanya pada mendengarkan siaran radio. Ayatullah mempertahankan hubungan dalam bentuk korespondensi secara regular dengan sejumlah Mullah di dalam negeri. Surat-surat Ayatullah Khomeini umumnya di kirim ke alamat yang sangat rahasia agar tak di ketahui SAVAK. Ayatullah Muthahari dan Montazeri di Qum serta Ayatullah Muhammad Ali Qazi Thabataba'i di Tabriz, termasuk di antara yang sering menerima surat dari Ayatullah Khomeini. Selain itu Ayatullah Khomeini juga sering menulis surat terbuka yang di tujukan kepada penguasa Iran.

³⁴ Sihbudi, *Biografi*, h.52-53.

³⁵ Moojan Momem, *An Introduction to Shi'i Islam : The History and Doctrines of Tvelever Shi'ism* (New Haven: Yale University Press, 1985), 262-263.

Ayatullah Khomeini juga menjalin kontak dengan sejumlah organisasi dan pemikir “radikal” seperti PLO dan asosiasi mahasiswa muslim. Ayatullah juga menjalin kontak dengan dua tokoh Ulama yang sangat kharismatik: Ayatullah Sayyid Muhammad Baqir Sadr (tak ada hubungan famili dengan Baqir Sadr), Ulama kelahiran Qum yang kemudian di kenal sebagai pemimpin umat Syi’ah Libanon. Ayatullah Baqir Sadr mengunjungi Ayatullah Khomeini pada 1967 guna memobilisir dukungan dari kaum Ulama Najaf dalam menghadapi perang “enam hari” Arab-Israel.³⁶

Setelah pemimpin partai Ba’th, Hasan al-Bakr dan digantikan oleh Saddam Husain, hubungan Ayatullah Khomeini dengan Baghdad sempat membaik. Rezim Irak “memanfaatkan” keberadaan Ayatullah Khomeini untuk menekan Syah Iran, ketika hubungan Baghdad dalam suasana konflik.

Ayatullah Khomeini tidak berhenti melancarkan kritik tajamnya terhadap gaya pemerintahan rezim Syah. Dalam kuliah-kuliah yang di berikannya di Najaf, pada 21 Januari - 8 Februari 1970, ia mengemukakan bahwa dunia Islam sedang dilanda keputusasaan dan impotensi. Ayatullah menyebutkan bagaimana kaum muslim didzalimi kaum Yahudi dan Kristen tak luput juga dari propaganda imperialisme dan kolonialisme dengan bantuan penguasa yang korup dan merendahkan diri mereka dari pengaruh asing yang menyesatkan. Disamping itu

³⁶ Sihbudi, *Biografi*, h.55-56.

Ayatullah juga mengkritik Ulama yang asyik dengan soal-soal skolastik dan sok pamer ilmu, seperti topik kebersihan jasmani dan lain-lain. Pada kuliahnya ini, Ayatullah juga mengemukakan gagasan pemerintahan Islamnya yaitu *Wilayah Faqih (Wilayat-i Faqih)*.³⁷

Pada tanggal 13 Oktober 1971, Syah memperingati ulang tahun ke-2500 berdirinya kerajaan Iran, di depan makam Cyrus Agung. Dalam upacara tersebut Syah membanggakan Iran sebagai “negara raja-raja” dan membanggakan dirinya sebagai keturunan Cyrus Agung. Ayatullah Khomeini mengecam kepercayaan itu dengan menyerukan pada para pengikutnya bahwa kaum muslimin tidak mempunyai persamaan dengan warisan Iran pra-Islam. Dan Islam akan tampil untuk menghancurkan prinsip monarki turun temurun.³⁸

Antara tahun 1972-1976 semakin banyak mahasiswa yang tertarik pada kuliah-kuliah Ayatullah Khomeini di Najaf. Para mahasiswa Iran penentang Syah di Eropa dan Amerika datang mengunjungi Ayatullah di Najaf. Ayatullah Khomeini menerbitkan edisi pertamanya *Vilayat-i Faqih*, versi polemisnya juga diterbitkan dengan judul *Hukumat-i Islami* dan merupakan karya yang secara tajam menyerang teori-teori Ayatullah al-Uzma Abul Qasim Kho’i dari Najaf. Ayatullah Kho’i tidak menyepakati pemikiran Khomeini tentang keterlibatan langsung faqih dalam

³⁷ Rahnema, *Para Perintis*, h.93.

³⁸ Esposito, *Dinamika*, h.189.

pemerintahan. Pada tahun 1976 ini pula Syah memberlakukan penanggalan Parsi sebagai ganti penanggalan *Hijriyah* yang selama ini berlaku di Iran yang dikenal sebagai kalender *Syahnasahi*.³⁹

Pada tanggal 28 Oktober 1977 putra sulung Ayatullah Khomeini, Ayatullah Sayyid Agha Mustafa Khomeini dibunuh agen-agen SAVAK di Teheran.⁴⁰

Pada Januari, tepatnya tanggal 7 Januari 1978, surat kabar *Ettelaat* di Teheran menurunkan tulisan yang bernada fitnah terhadap Ayatullah Khomeini bahwa Ayatullah Khomeini telah dibayar oleh dinas rahasia Inggris dalam melawan rezim Syah. Akibatnya terjadi demonstrasi anti-Syah terbesar sejak 1963. Demonstrasi yang terjadi pada 9 Januari 1978 itu merupakan titik awal dari suatu pergolakan panjang yang meruntuhkan monarki rezim Syah.

Demonstrasi besar-besaran berikutnya terjadi di Teheran pada 17 Februari 1978. Ayatullah Khomeini menghendaki demonstrasi lebih lanjut. Semua masjid digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id ditutup selama sepekan di Teheran dan pada 18 Februari 1978 terjadi pemogokan yang dimaksudkan untuk memperingati 40 hari mereka yang syahid pada demonstrasi sebelumnya.

Kemudian pada tanggal 30 Maret, mengikuti seruan Ayatullah Khomeini, terjadi pemogokan umum bertepatan dengan berakhirnya 40 hari berkabung bulan

³⁹ Sihbudi, *Dinamika*, h.29-30

⁴⁰ Sihbadi, *Biografi*, h.149.

Februari. Pemogokan ini melatar belakangi demonstrasi anti-Syah yang diorganisir para Mullah diseluruh Iran. Sejak saat itu peringatan 40 hari bagi mereka yang syahid selalu dimanfaatkan untuk mengadakan demonstrasi anti-Syah. Begitu pula hari-hari besar penganut Syi'ah selalu diperingati dengan demonstrasi.⁴¹

Di akhir bulan Ramadhan (4 September), 200 ribu sampai 500 ribu demonstran menuntut kembalinya Ayatullah Khomeini ke Iran. Pemerintah melarang rapat-rapat umum yang diadakan pihak oposisi. Namun pemogokan tetap berlanjut. Dan pada 7 September 1978 lebih dari 100 ribu demonstran berbaris sepanjang ibukota Teheran. Esoknya, keadaan darurat perang diberlakukan selama 6 bulan di Teheran dan di kota-kota lainnya. Demonstrasi besar meletus, setelah terjadi insiden terburuk di Jaleh (Timur Teheran) dimana tentara mengepung dan menembaki kerumunan 5000 pemuda yang mengakibatkan tewasnya sedikitnya 97 orang yang kemudian dikenal sebagai peristiwa *Jum'at Hitam*. Peristiwa ini menjadi salah satu pemicu terjadinya Revolusi.⁴²

Sepanjang September 1978 (Syahriwar/Mehr 1357 HS), rezim Syah mengetatkan pengawasannya terhadap pihak oposisi (termasuk memberlakukan sensor pers) dan membujuk rezim di Baghdad agar menempatkan Ayatullah Khomeini disebuah penjara khusus. Tanggal 6 Oktober 1978 Ayatullah dipaksa keluar dari Iran atas permintaan pribadi Syah sebagai bagian perjanjian antara Syah

⁴¹ Sihbudi, *Biografi*, h.63-64.

⁴² *Ibid*, h.50-60.

dan Saddam Husain. Ayatullah kemudian pergi ke Prancis. Pengusiran Ayatullah Khomeini merupakan kesalahan fatal yang dibuat Syah. Karena Ayatullah Khomeini setelah berada di Prancis justru semakin populer. Pengusiran itu juga mengakibatkan terjadinya demonstrasi yang diwarnai kekerasan di Iran. Syah berusaha memenuhi tuntutan oposisi, antara lain dengan mengumumkan amnesti bagi para tahanan politik di luar negeri. Namun rezimnya justru semakin menghadapi ancaman yang lebih serius.⁴³ Dan akhirnya pada 16 Januari 1979, Syah meninggalkan negerinya menuju ke Aswan Mesir.⁴⁴ Dua minggu kemudian pada 1 Februari 1979, Ayatullah Khomeini kembali ke negerinya setelah sekitar 14 tahun berada di pengasingan untuk memimpin langsung jalannya Revolusi Islam. Hanya sepuluh hari setelah itu, ia berhasil menumbangkan sistem monarki di Iran. Pada 11 Februari 1979, Ayatullah Khomeini oleh rakyat dipilih secara aklamasi sebagai penguasa tertinggi dalam sistem Republik Islam Iran yang berlandaskan *Wilayah Faqih*.⁴⁵ Sekembali dari pengasingannya, ia sempat tinggal sebentar di Qum dan kemudian pindah ke Jamaran, Teheran, hingga saat wafatnya pada 3 Juni 1989.

Dalam pandangan Hamid Enayat, Ayatullah Khomeini menggunakan Kenanga Karbala sebagai alat pemantik dorongan politik yang kuat.⁴⁶ Perlawanan

⁴³ Sihbudi, *Biografi*, h.67.

⁴⁴ *Ibid*, h.72

⁴⁵ *Ensiklopedi Islam*, V.3, h.54.

Lanjutan

Husain terhadap Yazid dan kematiannya di Karbala merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah umat Islam. Tindakan Husain merupakan contoh perlawanan tanpa kenal menyerah terhadap penguasa yang menyimpang dari konsep ideal Islam. Pertentangan Husain dan Yazid merupakan pertentangan klasik antara kebaikan dan keburukan. Husain mewakili kebajikan yang dapat ditemukan dalam Islam, sebaliknya Yazid lambang despotisme, dinasti dan kekuasaan sementara.⁴⁷ Dari sini dapat disimpulkan bahwa Khomeini melihat sosok Syah Pahlevi, sebagai perwujudan Yazid yang harus ditentang karena telah menyimpang dari ajaran-ajaran kebaikan, yang telah menyengsarakan rakyat Iran pada masa kekuasaannya.

D. KARYA - KARYA AYATULLAH KHOMEINI.

I. DALAM IRFAN, AKHLAQ, DAN PUISI.

1. *Syarh Du'a al-Sahar* atau *Mukhtar fi Syarh al-Muta'alliq bi al-Sahar*, sebuah pembahasan mistikal dan spiritual yang tinggi dalam bahasa Arab terhadap salah satu dari do'a-do'a Islam yang paling membangkitkan inspirasi. Karya ini ditulis dalam bahasa Arab. Penerjemah Persianya Sayyid Ahmad Fihri,

⁴⁶ Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni dan Shi'ah*. terj. Asep Hikmat (Bandung; Pustaka, 1988), h.301.

⁴⁷ Akbar S. Ahmed, *Citra Muslim Tinjauan Sejarah dan Sosiologi*, terj. Nunding Ram dan Ramli Jakob, (Jakarta: Erlangga, 1992), h.36. Bandingkan John L. Esposito, *Ancaman Islam Mitos atau Realitas ?*, terj. Alwiyah Abdur Rahman (Bandung; Mizan, 1994), h.123. Lihat pula John L. Esposito dan John O'Voll dalam *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*, terj. Rahmaini Astuti (Bandung; Mizan, 1999), h.77.

menyatakan bahwa ini adalah karya pertama Ayatullah Khomeini yang ditulis pada tahun 1347 H/1928 M. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Persia tahun 1359 H/1980 M.

2. *Misbah al- Hidayah fi al- Khilafah wa al- Wilayah.*

Inilah salah satu dari karya paling awalnya yang juga paling pelik; ditulis dalam bahasa Arab, ketika Ayatullah Khomeini berusia 29 tahun. Buku ini membahas beberapa dimensi mistikal yang amat mendalam dari Khilafah dan wilayahnya Nabi Muhammad Saw. Dan Ali bin Abi Thalib, dalam istilah-istilah yang biasa dipakai dalam tradisi mistik yang dibangun oleh Ibn 'Arabi -yang juga sering dikutip di buku itu-. Ayatullah Khomeini juga mengacu pada pandangan-pandangan mistik dan teologis dari Qadhi Sa'id Qummi (meninggal 1104 H/1962 M), sebagaimana yang terungkap dalam karyanya, *al-Bawariq al-Malakutiyyah*.

Disamping itu, Ayatullah Khomeini juga sering mengacu pada pandangan-pandangan gurunya sendiri Mirza Muhammad 'Ali Syahabadi. Buku ini juga telah di terjemahkan oleh Sayyid Ahmad Fihri ke dalam bahasa Persia pada 1360 H/1981 M.

3. *Hasyiyah*⁴⁸ pada *Syarh*⁴⁹ *Fushush al-Hikam*.

⁴⁸ *Hasyiah* adalah komentar yang diletakkan penulis pada catatan kaki .

⁴⁹ *Syarh* adalah komentar atas sebuah buku yang bersatu dengan buku yang dibahasnya.

Fushush al-Hikam adalah karya sufi besar Muhyiddin Ibn 'Arabi, dan *Syarh* terhadap karya itu, yang ditulis Syafruddin Daud Qaysari adalah yang paling terkenal. Karya Ayatullah yang ditulis dalam bahasa Arab ini diselesaikan selama 7 tahun (1347-1354 H/1928-193 M) saat Ayatullah sedang mempelajari karya-karya mistikal di bawah bimbingan Ayatullah Mirza Muhammad 'Ali Syahabadi.

4. *Hasyiyah* pada *Mishbah al-Uns Mishbah al-Uns Bayn al-a'qul wa al-Mashud* adalah sebuah *syarh* yang ditulis Muhammad Ibn Hamzah Ibn Muhammad yang dikenal sebagai Ibn Fanari- terhadap karya Abu al-Ma'ali Shadr al-Din Muhammad Ibn Ishaq al-Qunawi, *Miftah al-Ghayb al-Jam' wa al-Wujud*.

Seperti *Hasyiyah* pada *Syarh Fushush al-Hikam*, ini juga merupakan karya yang ditulis ketika Ayatullah Khomeini sedang belajar pada Ayatullah Syahabadi (1350-1354 H/1931-1935 M). Karya ini diselesaikan pada tahun 1355 H/1936 M kedua *Hasyiyah* ini diterbitkan dalam satu buku dengan judul *Ta'liqat ala Syarh Fushush al-Hikam wa Mishbah al-Uns* oleh Muassaseh-ye Pasdaran-e Islam, Ramadlan 1406 H.

5. *Chihil Hadits*, diselesaikan pada Muharram 1358 H/1939 M, adalah sebuah pembahasan dalam bahasa Persia tentang empat puluh Hadits Rasul Saw. Dan para Imam *Ahlul Bayt*, yang berkenaan dengan masalah-masalah

akhlaq dan mistik. Karya ini merupakan hasil dari kuliah-kuliah Ayatullah Khomeini tentang akhlaq selama tahun 1356-1358 H/1937-1939 M, yang yang pertama kali berlangsung di Madrasah Faiziyah. Dan setelah dilarang oleh Reza Khan, dilangsungkan di Madrasah Hajj Mulla Shadeq. Di permulaan bukunya, Ayatullah Khomeini menyebutkan guru-gurunya (Syaikh) dalam Hadits dan rantai-rantai gurunya (Masyyahah) sampai pada Muhammad Ibn Ya'kub al-Kulayni (meninggal 329 H/941 M).

6. *Asrar (atau SIRR) al-Shalat atau Mi'raj al-Salikin wa shalat al-Arifin*, diselesaikan pada 2 Robiul Tsani 1358 (Mei 1939) dalam usia 39 tahun dan diterbitkan pertama kali dalam Yadnameh-ye Syahid Muthahhari (jilid 1).
7. *Adab al-Shalat*, ditulis dalam bahasa Persia adalah sebuah pembahasan mistikal dan spiritual yang mendalam tentang shalat dan adab (sopan santun)-nya, nilai pentingnya, dan rahasia-rahasiannya. Ayatullah menyelesaikannya pada Robiul Tsani 1361 H (April 1942). Buku ini disunting dan diberi catatan kaki oleh Sayyid Ahmad Fihri, yang juga menerjemahkannya ke bahasa Arab.
8. *Syarh-e Hadits-e Junud-e Aql wa Jahl*, adalah sebuah pembahasan tak lengkap atas sebuah Hadits yang terkenal dalam *Ushul al-Kafi* "Kitab al-Aql wa Jahl". Ini adalah sebuah karya filsafat dan etika.
9. *Liq'a'llah*, adalah sebuah karya tujuh halaman dalam bahasa Persia yang diterbitkan di bagian belakang buku Hajj Mirza Jawad Maliki, *Liq'a'llah*.

10. *Diwan*, atau kumpulan dari puisi-puisinya dalam bahasa Persia yang tampaknya hilang akibat penjarahan SAVAK di rumah Ayatullah Khomeini. Seperti karya lainnya, *Hasyiyah untuk Fushush al-Hikam*, yang juga pernah dianggap telah hilang, tapi kemudian ditemukan di kota Hamadan, Diwan ini mungkin akan diketemukan suatu saat nanti.
11. *Jihad-e Akbar*, atau *Mubarezeh ba Nafs*, adalah sebuah buku yang disusun oleh Sayyid Hamid Ruhani dari kuliah-kuliah Ayatullah Khomeini selama tinggal di Najaf, yang berisikan masalah-masalah akhlaq dan spiritual.
12. *Tafsir-e Surah-ye Hamid* adalah sebuah tafsir surat al-Fatihah dalam bahasa Persia yang mulanya disampaikan dalam lima kuliah Ayatullah Khomeini yang disiarkan oleh TV Republik Islam Iran pada bulan-bulan pertama 1980. Karya ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Dr. Hamid Algar. Dalam bahasa Persianya buku ini diterbitkan bersama dengan pembahasan *al-Alaq*.
13. *Subuye 'Isyq* adalah kumpulan dari delapan Ghazalnya yang diterbitkan tak lama setelah wafatnya.
14. *Badehye 'Isyq* memuat surat-surat mistiknya untuk menantunya, Fathimah Thabathaba'i dan juga beberapa puisi mistiknya yang lain.
15. *Rah-e 'Isyq* adalah surat lain Ayatullah Khomeini yang ditujukan pada menantunya.

16. *Nuqtheh-ye 'Athf* juga memuat sebuah surat yang ditujukan kepada anaknya, Hajj Sayyid Ahmad Khomeini, dan juga sebuah Tarji' Band (sebuah bentuk puisi) dan dua puluh dua ruba'iyat (bentuk puisi yang lain).

II. DALAM KALAM DAN POLITIK.

Berikut ini adalah karya-karya Ayatullah Khomeini dalam ilmu kalam. Meskipun demikian harus selalu diingat bahwa masalah-masalah kalam selalu membawa konsekuensi-konsekuensinya dalam politik. Dalam beberapa karya dibawah ini, seperti *Kasyf al- Asrar* dan *Vilayat-i Faqih*, kalam benar-benar keluar dari batas-batas tradisionalnya dan bergerak dengan pasti ke wilayah teori politik.

17. *Syarh-e Hadits-e Ra's al-Jalut* adalah sebuah pemaparan terhadap pembahasan terkenal dari debat Imam Ridha dengan pemuka-pemuka berbagai agama seperti Kristen, Yahudi dan Zorroaster yang diriwayatkan dalam karya Syaikh al-Shaduq (meninggal 381 H/ 902 M), kitab *al-Tauhid* dan *'Uyun Akhbar al-Ridha*. Karya ini diselesaikan pada tahun 1348 H/1929 M, dan menurut A'inehye Damisywaran, ini adalah salah satu karya awalnya atau bahkan karya petamanya, menurut pernyataan Ayatullah Khomeini sendiri. Ada dua pembahasan -keduanya dalam bahasa Arab- yang ditulis Ayatullah Khomeini tentang riwayat ini.

18. *Hasyiyah* pada *Syarh-e Hadits-e Ra's al-Jalut* yang merupakan karya Qadhi Sa'id Qummi, ditulis dalam bahasa Arab.
19. *Kasyf al-Asrar*, yang telah disebutkan diatas, pada intinya berisi tiga hal penting, yaitu *pertama*, serangan tajam terhadap kebijakan Reza Syah. *kedua*, jawaban terhadap buku *Scrats of Thousand Years* yang ditulis gerakan *Pak Dini-nya* Ahmad Kasravi, di mana gerakan ini selalu melancarkan serangan terhadap Mullah dan madzhab Syi'ah yang dituduh sebagai sumber keterbelakangan Iran. *Ketiga*, kritik pedas Khomeini kepada kaum Syi'ah yang apatis terhadap situasi sosial-politik.
20. *Risalah fi at-Thalab wa al-Iradah* adalah hasil dari tahun-tahun setelah Ayatullah Khomeini memulai kuliahnya tentang *Ushul al-Fiqh* tahun 1945. Karya ini diselesaikan pada bulan Ramadhan 1371 H/1951 M, dan diterjemahkan dalam bahasa Persia oleh Sayyid Ahmad Fihri (1362 H/1983 M). Isinya adalah perubahan disekitar masalah- masalah kalam, seperti sifat Iradah dan Kalam Allah, kebebasan manusia, hakekat, kebahagiaan manusia dan sebagainya.
21. *Lubb al-Atsar* atau *Risalah fi al-Thalab Wa al-Iradah wa al-jabr wa al-Tafwid*, sebuah rekaman Ayatullah Ja'far Subhani atas kuliah-kuliah Ayatullah Khomeini dalam bahasa Arab. Ditulis pada 1371 H/ 1951 M dan

diselesaikan dua tahun berikutnya. Sebuah foto kopi dari karya setebal 57 halaman ini terdapat di perpustakaan Dar Rah-e Haqq Institute, Qum.

22. *Vilayat-i Faqih* atau *Hukumat-i Islami*, ditulis dalam bahasa Persia, adalah sebuah kompilasi dari sekitar duabelas kuliah Ayatullah Khomeini di Najaf tentang wilayah al-Faqih, yang dikumpulkan oleh Sayyid Hamid Ruhani.

III. USHUL DAN FIQH.

23. *Risalah-i Musytamil bar Fawa'idi dar Ba'dhi Masa'il-e Musykilah*, yang memuat pendapat-pendapat gurunya, Ayatullah Ha'iri Yazdi, dalam bidang Ushul al-Fiqh. Karya awal ini adalah hasil dari beberapa tahun Ayatullah Khomeini menghadiri kuliah-kuliah gurunya itu.
24. *Tahdzib al-Ushul*, sebuah karya tiga jilid yang berisi kuliah-kuliah Ayatullah Khomeini tentang *Ushul al-Fiqh* yang disampaikan selama sekitar duabelas tahun, setelah tahun 1945 yang direkam dan di kumpulkan oleh muridnya, Ayatullah Ja'far Subhani.
25. *Risalah fi al-Ijtihad wa al-Taqlid*.
Sebuah rekaman kuliah-kuliah Ayatullah Khomeini dalam bahasa Arab yang ditulis oleh Ayatullah Ja'far Subhani pada 1370 H/1950 M. Buku ini diterbitkan bersama *Tahdzib al-Ushul*.

26. *Nayl al-Awthar fi Bayan Qo'adat la Dharar wa la Dhirar*, sebuah rekaman ceramah-ceramahnya dalam topik ushul yang ditulis oleh Ayatullah Ja'far Subhani pada 1375 H/1955 M. Ini juga diterbitkan bersama *Tahdzibal-Ushul*.
27. *Ta'liqah ala Kifayat al-Ushul*, diselesaikan pada 1368 H/1948 M adalah sebuah anotasi yang ditulis pada karya terkenal dalam *Ushul al-Fiqh* oleh Akhund Khurasani.
28. *Al-Rasa'il*, dua jilid, adalah kumpulan pembahasan-pembahasan Ayatullah Khomeini tentang masalah-masalah seperti *Ushul* sebagai prinsip *la Dharar wa la Dhirar* (1367 H/1947 M), *Istishhab* (1370 H/1950 M), *Ta'adul wa Tarajih* (1370 H/1950 M), *Ijtihad wa Taqlid* (1370 H/1950 M), *Taqiyyah* (1373 H/1953 M). Diterbitkan pada 1385 H/1965 M.
29. *Risalah fi Mawdhu 'Ilm al-Ushul*, juga sebuah buku *Ushul al Fiqh*.
30. *Risalah fi Qa'adat man Malak*
31. *Kitab al-Thaharah*, 3 jilid, berisi kuliah-kuliah Ayatullah Khomeini tentang *Fiqh*, yang disampaikan di Qum, sebelum pengasingannya. Jilid pertama diselesaikan pada tanggal 10 Dzulhijjah 1373, yang kedua pada 22 Rabi'ul Awal 1376, dan yang ketiga pada 11 Sya'ban 1376.
32. *Ta'liqah ala al-Urwat al-Wustqa*, diselesaikan pada Jumadil Awwal 1375 H/1955 M, adalah sebuah anotasi pada karya fiqh Sayyid Muhammad Kazim Yazdi, *al-Urwat al- Wustqa*.

33. *Al-Makasib al-Mukharamah*, dalam dua jilid, diselesaikan dalam Jumadal Awwal 1380 H/1960 M dan diterbitkan pada Muharram 1381 (1961).
34. *Hasyiyah* pada karya Ayatullah Burujirdi, *Tawdhih al-Masa'il*, yang diterbitkan pada 1381 H/1961 M, setelah wafatnya Ayatullah Burujirdi.
35. *Risalah-ye Najat al Ibad*, sebuah karya fiqh dalam bahasa Persia tiga jilid.
36. *Hasyiyah* pada karya Hajj Mulla Hasyim Khurasani, *Risalah-ye Irts*, yang juga penulis *Muntakhad al-Tawarikh*.
37. *Ta'liqah ala Washilat al-Najat*, sebuah anotasi pada karya fiqhnya Sayyid Abu al-Hasanal al-Isfahani.
38. *Tahrir al-Washilah*, dalam dua jilid, adalah perluasan dari *Washilat al-Najat* Karya Ayatullah Sayyid Abu al-Hasan al-Isfahani (meninggal 1365 H/1946 M) dalam bidang fiqh dari kitab *al-Thaharah* sampai kitab *al-Diyat*. Buku ini, yang juga memuat teks asli wasilah bersama-sama dengan anotasi dan beberapa tambahan dari Ayatullah Khomeini, sebagian besar ditulis selama Ayatullah Khomeini tinggal di Turki, dan diselesaikan di Najaf. Dua terjemahan Persianya sudah dilakukan. Dua karya lain yang ditulis sehubungan dengan karya ini adalah *Tafshil al-Syari'ah fi Syarh Tahrir al-Washilah*, sebuah *syarh* 40 jilid oleh Ayatullah Hajj Syaikh Muhammad Fadhil Lankarani (beberapa jilid diantaranya telah terbit), dan *Mustanad al-Tahrir* oleh Syaikh Ahmad Muthahhari (yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Persia oleh Hasyim Nuri).

39. *Manasikh-e Hajj*, dalam bahasa Persia, memuat fatwa-fatwa Ayatullah Khomeini tentang ibadah Haji. Cetakan ketiganya 187 halaman, terbit pada 1384 H / 1964 M.

40. Kitab *al-Bay*, dalam lima jilid, berisi kuliah-kuliah Ayatullah Khomeini selama 15 tahun tentang fiqh saat bermukim di Najaf. Ditulis antara tahun 1380-1396 H/1960-1976 M, naskah pertama dari jilid kelima selesai pada Jumadal Awwal 1396 H / Mei 1976 M. Buku ini diterbitkan antara tahun 1391-1397 H / 1971-1977 M dari Najaf. Satu bagian buku ini yang berhubungan dengan Wilayah Faqih telah diterjemahkan dalam bahasa Persia dan diterbitkan oleh Departemen Pertahanan Islam di bawah judul "*Syu'un wa Ikhtiyarat-e Wali-ye Faqih*".

41. Kitab *al-Khalal fi al-Shalat*, ditulis antara tahun 1397-1398 H/1977-1978 M.

42. *Risalah fi Ta'yin al-Fajr fi al-Layali al-Muqmirah*, pembahasan singkat tentang masalah penentuan waktu fajar pada malam bulan purnama, diterbitkan tahun 1367 H/1988 M.

Di samping karya-karya tersebut di atas, ada lagi kumpulan fatwa atau kuliah Ayatullah Khomeini yang disusun muridnya, beberapa diantaranya adalah :

1. *Tawdhih al- Masa'il*, dalam bahasa Persia yang memuat fatwa-fatwa Khomeini tentang berbagai macam masalah syari'ah.
2. *Risalah-i dar Ahkam-e Ma'lulin wa Majruhin Muthabiq ba Fatwa-ye Imam*, berisi fatwa-fatwanya untuk mereka yang terluka atau cacat karena perang, dikumpulkan oleh Sayyid Husayn Muhajir.
3. *Zubdat al-Ahkam*, sebuah kumpulan fatwanya, dalam bahasa Arab.
4. *Istifta'at*, dalam dua jilid, berisi kumpulan pertanyaan yang diajukan pada Ayatullah Khomeini dan jawaban-jawabannya. Jilid pertama, dalam 519 halaman telah diterbitkan oleh Intisyarat-e Jami'eh-ye Mudarisin-e Hawzeh-ye Ilmiyyeh-ye Qum.
5. *Faramin-e Ilahi ya Ahkam-e Jebheh*, memuat fatwa-fatwanya sehubungan dengan kebutuhan religius para pejuang di medan perang, diterbitkan oleh I.R.G.C (Islamic Republic Guardian Council), 1364 H.
6. *Fadhilat wa Ahkam-e Namaz-e Jama'at*, dikumpulkan oleh Goroh-e Farhangi-ye Jihad-e Danisyahiye San'ati-ye Syarif (1364 H).
7. *Risaleh-ye Nawin* adalah sebuah pemaparan yang memikat tentang masalah-masalah fiqh dalam bahasa Persia, sehubungan dengan fatwa-fatwa Ayatullah Khomeini, yang disusun oleh Abdul Karim Bi-Azar Syirazi (1362-1364 H).

Kemudian, ada juga beberapa kumpulan lain dan pilihan dari pidato-pidato, kuliah-kuliah, pernyataan-pernyataan, surat-surat, dan wawancara Khomeini yang

muncul selama 11 tahun terakhir sejak kemenangan Revolusi Islam di Iran. Yang paling penting diantaranya adalah :

1. *Shahifeh-ye Nur*, diterbitkan oleh Markaz-e Madarik-e Farhangi-ye Inqilab-e Islami, Departemen Pertahanan Islam. Sebanyak 18 jilid . Buku ini merupakan kumpulan paling lengkap dari pidato-pidato dan surat-surat Ayatullah Khomeini.
2. *Payamha wa Sukhanraniha -ye Imam Khumayni*. Inti Syarat Nur, 6 jilid.
3. *Dar Yustuju-ye rah az Kalam-e Imam*, sebuah kumpulan pernyataan-pernyataan Ayatullah Khomeini dari tahun 1341 H (1962-1963 M) hingga 1361 H (1982-1983 M) dalam 22 jilid, diterbitkan oleh Amir Kabir. Masing-masing jilid menyangkut topik-topik yang berbeda; sebagai contoh, tentang Mustadh'afin dan Mustakbirin, perang dan jihad, wanita, kepemimpinan dalam Revolusi Islam, Ulama, kelompok kontra Revolusi, Nasionalisme, kebebasan Israel dan Zionisme, kelompok minoritas agama, pendidikan dan kebudayaan, dan lain-lain.
4. *Tali'eh-ye Inqilab-e Islami*, kumpulan wawancara terhadap Ayatullah Khomeini oleh media massa di Najaf, Paris dan Qum ; diterbitkan Markaz-e Nasyr-e Danisygahi, 1362 H, hal. 393.

5. *Balagh*, kumpulan tiga jilid dari pernyataan Ayatullah Khomeini yang disusun menurut topik, tentang berbagai masalah yang diterbitkan oleh Sazman-e Tablighat-e Islami, Amir Kabir, 1366 H.⁵⁰

⁵⁰ . *Algar, Mata Air*, h. 99-107.

BAB III

WILAYAH FAQIH

(PEMIKIRAN POLITIK AYATULLAH KHOMEINI)

A. Pengertian Wilayah Faqih

Kata *Wilayah*, berasal dari akar kata *wali* (waliyun). Kata-kata *wala*, *Wilayah*, *walayah*, *awla*, *mawla*, mempunyai akar kata yang sama yaitu *wali*. Louis Ma'luf dalam kamusnya memberi arti kata tersebut dengan ungkapan *tabi'ahu min ghoiri fashlin* (mengikutinya tanpa suatu pemisah)¹. Dari sini, kata tersebut digunakan dalam arti dekat. Karena itu, ia kadang berarti teman, menolong, mencintai, mengikuti, meneladani, memimpin, atau mematuhi.² Dalam perkembangan selanjutnya, *Wilayah* atau *wala* dapat berarti pemerintah, supremasi, atau kedaulatan³.

Dalam kepustakaan Syi'ah, kata *Wilayah* digunakan untuk menunjukkan kesetiaan kepada pemerintahan Imam dan mengakui hak Imam untuk memerintah.

¹ Louis Ma'luf, *Al-Munjid* (Beirut; Dar al-Masyriq, 1973), h.918.

² Murtadha Muthahhari, "Wilayah : Konsep Kepemimpinan Dalam Islam" , *Waris* (No. 12/Tahun III/ Rabiul Akhir-Jumadil Akhir 1418 H), h.4

³ Mumtaz Ahmad (ed), *Masalah-Masalah Teori politik Islam*, terj. Ena Hadi (Bandung; Mizan, 1993), h.130

Dalam hal ini, Wilayah mempunyai posisi penting dalam ajaran Syi'ah dan dijadikan sebagai salah satu dari rukun Iman, yang berbeda dengan aqidah Sunni. Muhammad Kamil al-Hasyimi mengatakan: "orang-orang Syi'ah mengatakan bahwa Wilayah adalah rukun yang terpenting, tetapi mereka tidak menyebutkan Syahadatain, seakan-akan dengan Wilayah sudah cukup"⁴. Kemudian, dari penggunaan ini Wilayah didefinisikan sebagai *otoritas (wewenang) yang mengandung hak untuk menuntut keta'atan*.⁵

Menurut Murtadha Muthahhari, berbagai bentuk dari akar kata *Wilayah* dan kata-kata jadiannya merupakan kata-kata yang paling sering berulang dalam al-Qur'an. Konon, demikian lanjut Muthahhari, kata-kata tersebut telah digunakan sebanyak 124 kali dalam bentuk kata benda dan 112 kali dalam bentuk kata kerja.⁶ Penggunaan kata *Wilayah* dan kata derivatnya di dalam al-Qur'an mempunyai makna yang berbeda-beda sesuai dengan konteks apa dan siapa kata itu digunakan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan *Faqih*, dalam ilmu bahasa Arab disebut *sighat mubalaghah ismi al-fail*. Arti semula dari *fiqih* adalah *al-fahm* (pemahaman) atau *ahsana idrakahu* (mengetahui dengan baik).⁷ Karena berbentuk *mubalaghah ismi al-fail*, dimana

⁴ Muhammad Kamil al-Hasyimi, *Hakikat Aqidah Syi'ah*, terj.. M. Rosyidi (Jakarta; Bulan Bintang, 1989), h.113.

⁵ Sachedina, *Kepemimpinan*, h.68.

⁶ Murtadha Muthahhari, *Kepemimpinan Islam*, terj. Husain al-Habsyi (Banda Aceh; Gua Hira', 1991), h.1

⁷ Ibrahim Anis et al, *al-Mu'jam al-Wasith* (Beirut; Dar al-Fikr, tanpa tahun), II, h.698.

artinya adalah bahwa lafadh itu bermakna *isim fail* dengan suatu kelebihan (penyangatan)⁸, maka *faqih* berarti *orang yang sangat paham* atau *orang yang sangat baik pengetahuannya*. Menurut Ahmad Hasan, kata *fiqh* pada mulanya digunakan orang-orang Arab sebagai seorang yang ahli dalam mengawinkan onta yang mampu membedakan onta betina yang sedang berahi dari betina yang sedang hamil. Dengan sendirinya, ungkapan **فحل فقيه** merupakan kata yang umum digunakan dikalangan mereka. Dari ungkapan ini, diturunkan pengertian pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu hal.

Al-Qur'an, demikian lanjut Ahmad Hasan, mempergunakan kata *fiqh* dalam pengertian *memahami* secara umum di lebih dari satu tempat. Ungkapan al-Qur'an

لِتَفْقَهُوا فِي الدِّينِ (agar mereka melakukan pemahaman dalam agama), menunjukkan bahwa di masa Rasulullah istilah *fiqh* tidak hanya digunakan dalam

pengertian hukum saja, tetapi mempunyai arti yang lebih luas mencakup semua aspek dalam Islam, yaitu theologis, politis, ekonomis dan hukum.⁹ Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan keIslaman, ruang lingkup istilah *fiqh* secara bertahap menyempit, dan akhirnya hanya digunakan untuk disiplin ilmu pengetahuan keIslaman, yaitu ilmu *fiqh*. Dalam konteks ini, Ezzati menjelaskan :

⁸ Muhtafa al-Filayaini, *Jami' al-Durus al-'Arabiyah* (Beirut; al-Maktabah al-Mishriyah, 1984), I, h. 199.

⁹ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum tertutup*, terj. Agah Garnadi (Bandung; Pustaka, 1994), h. 1.

“Ia adalah ilmu, disiplin dan ilmu pengetahuan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban manusia serta mengenai apa yang buruk dan baik bagi manusia secara individu dan secara kolektif dengan menggunakan petunjuk-petunjuk yang terinci dan melalui sumber-sumber serta penalaran mereka yang pantas”.¹⁰

Menurut Ali Mishkini, agama Islam dan semua ajaran agama samawi dapat dibagi menjadi tiga lingkup, yaitu : intelek atau kwalitas ; atribut psikis dan psikologis; dan gerak-gerik fisik. Bagian yang berkaitan dengan intelektual manusia adalah bagian yang mengandung dasar-dasar ajaran aqidah. Bagian yang berhubungan dengan emosi, sikap dan kwalitas-kwalitas psikologis manusia adalah etika. Sedang bagian yang berkaitan dengan gerak gerik fisik manusia adalah yang menerapkan secara praktis hukum-hukum dan perintah-perintah agama. Seseorang yang ahli dalam bidang kajian pertama disebut mutakallimun (teolog), yang ahli dalam bidang kedua disebut akhlaqi (moralis), sedangkan yang mengambil keahlian dalam bidang yang ketiga disebut faqih.

Berdasarkan atas pembagian ajaran agama tersebut, Ali Mushkini lalu menarik pengertian bahwa *seorang faqih sebagai seseorang individu yang memiliki kemampuan menguraikan sebagian atau seluruh peraturan-peraturan secara umum*

¹⁰ A. Ezzati, *Gerakan Islam Sebuah Analisa*, terj. Agung Sulistyadi (Jakarta; Pustaka Hidayah, 1990), h.24.

dan perintah-perintah Islam yang sah dari sumber-sumber yang asli.¹¹ Dalam hal ini

Khomeini menambahkan :

Seseorang yang mengetahui semua peraturan-peraturan Allah mampu membedakan sunnah yang shahih dari yang palsu, yang mutlak dari yang terbatas, yang umum dari yang khusus. Ia juga harus mampu menggunakan akalnyanya untuk membedakan hadits dari situasi lain, situasi taqiyyah dan yang berasal dari situasi lain serta memahami kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.¹²

Berdasarkan uraian di atas, maka *Wilayah Faqih* adalah otoritas yang mengandung hak untuk menuntut keta'atan yang dimiliki oleh individu yang memiliki kemampuan untuk menguraikan perintah-perintah Islam yang sah dari sumber-sumber yang asli.

B. Latar Belakang Lahirnya Wilayah Faqih

Munculnya Wilayah Faqih yang diprakarsai oleh Khomeini yang kemudian

dijadikan acuan dalam melaksanakan kedaulatan Ilahi setelah berakhirnya periode Imamah, dilatar belakangi oleh setidaknya oleh empat pemikiran penting. *Pertama*, berakhirnya Imamah, dalam pengertian apa yang di sebut sebagai *masa kegaiban besar/semperna*, yaitu masa sesudah meninggalnya keempat wakil Imam (niyahah

¹¹ Ali Miskhini, *Wali Faqih Ulama Pewaris Nabi*, terj. Muslim Arbi (Jakarta: Risalah Masa, 1991), h.7-8.

¹² Salim Azzam, (ed), *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, terj. Malikul Awal dan Abu Jalil (Bandung: Mizan, 1990), h.136.

al-Imam) sampai kedatangan kembali al-Mahdi pada akhir zaman. Pada masa sesudah berakhirnya perwakilan Imam (dari 941 meninggalnya wakil Imam terakhir dan seterusnya) yang biasa disebut sebagai perwakilan umum Pada masa inilah kepemimpinan dilanjutkan oleh *para faqih*.¹³ Apabila pelembagaan perwakilan Imam dipandang sebagai satu-satunya jalan untuk melestarikan struktur sosial-keagamaan umat Imamah, karenanya mereka benar-benar menjadi Imam-Imam fungsional yang memiliki potensi untuk menjadi *sulthan al-zaman* (otoritas yang berkuasa pada suatu waktu),¹⁴ maka demikian pula dengan tugas dan fungsi perwakilan umum yang diemban oleh para faqih (Ulama) di bawah komando Khomeini. Meskipun keberadaan para faqih itu tidak ditunjuk langsung oleh para wakil Imam sebelumnya.

Karena peran dan fungsi para faqih adalah melanjutkan tugas-tugas ke-Imam-an yang senantiasa dibutuhkan umat, maka dasar pemikiran *kedua*, pelembagaan Wilayah Faqih itu dimaksudkan sebagai upaya mengisi kevakuman Imamah sekaligus menjaga kelestariannya. Pemikiran tersebut dapat dipahami, mengingat Imamah bagi

¹³ Menurut catatan prof. Syahabi, ada empat tahap penting dalam frase terakhir yurisprudensi Syi'ah Imamiyah :

- a. Permulaan gaib besar Imam ke-12 (329 H) sampai meninggalnya syaikh al-Thusi (460 H).
- b. Masa antara meninggalnya syaikh al-Thusi hingga munculnya Ibn al-Muntahar al-Hilli (w. 726 H).
- c. Tahap antara kemunculan al-Hilli dan Aqa Baqir Behbihani (meninggal. 1208 H).
- d. Masa antara Aqa Baqir Behbihani sampai saat ini. Disinilah Khomeini muncul. Seperti dikutip Ahmad Musawi, "Teori Wilayah Faqih; Asal Mula Dan Penampilannya Dalam Literatur Hukum Syi'ah", dalam Mumtaz Ahmad (ed), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, terj. Ena Hadi (Bandung: Mizan, 1993), h.131-132.

¹⁴ Sachedina, *Kepemimpinan*, h.13.

umat Syi'ah adalah elemen keimanan yang wajib ada dan harus dipatuhi. Dengan tampilnya para faqih yang mengemban fungsi teologis-politis sebagaimana pendahulunya, sekaligus menempatkan mereka sebagai *sultan al-zaman li-tadbir al-anam* (otoritas yang ditunjuk untuk mengelola urusan-urusan umat manusia),¹⁵ dan dapat pula diartikan sebagai kreatifitas Ayatullah Khomeini. Sebab, dalam kurun waktu yang cukup panjang, yakni sejak masa kegaiban itu (tahun 941). Lembaga Imamah praktis tidak berfungsi lagi, meskipun pada masa Dinasti Shafawiyah (1501-1722 M) Syi'ah Imamah dijadikan madzhab resmi negara, dan pada masa ini hidup seorang Ulama *Ushuli*, yaitu 'Aqa Baqir Behbihani (meninggal 1205 H) yang dianggap perumus *marja' taqlid* dan mampu mengungguli Ulama *Akhbari*¹⁶. Oleh karena itu, ada analisa yang lebih ekstrim lagi yang mengatakan bahwa konsep Imamah itu sebenarnya belum pernah terealisasikan secara nyata, kecuali setelah Republik Islam Iran berdiri pada tahun 1979.

Dasar pemikiran *ketiga*, adalah idealisasi politik Syi'ah yang termanifestasikan dalam diri Khomeini. Artinya bila dalam abad-abad sebelumnya Islam Syi'ah

¹⁵ Sachedina, *Kepemimpinan*, h.173.

¹⁶ Ahmad, *Masalah-masalah*, h.129. Ushuli yaitu madzhab teologi Syi'ah yang dominan terdiri dari kalangan yang memiliki spekulasi dan pertimbangan yang memadai mengenai dasar-dasar ajaran Islam. (*Ensiklopedi Islam Ringkas*, h.419-420). Sedangkan Akhbari yaitu madzhab teologi Syi'ah tradisional yang membatasi peranan Ulama dengan prinsip bahwa syari'at Islam seharusnya benar-benar didasarkan pada tradisi (hadits) para Imam dalam artian bahwa al-Qur'an dan Sunnah ditafsirkan berdasarkan tradisi ilham para Imam, dalam hal ini mereka menolak ijihad secara spekulatif. (*ibid*, h.27). Lihat John Obert Voll, *Politik Islam Kelangsungan Dan Perubahan Di Dunia Modern*, terj. Ajat Sudrajat (Yogyakarta; Titian Ilahi Press, 1997), h.118-119.

belum berhasil mewujudkan cita-cita politiknya, yaitu terciptanya tatanan masyarakat Islam di bawah pemerintahan Imam sebagai pemegang kekuasaan untuk menggantikan pemerintahan tirani yang dzalim, maka pada abad ke-20 cita-cita tersebut dapat terealisasi melalui perjuangan panjang seorang wakil Imam, Ayatullah Ruhullah Khomeini. Meski harus diingat, bahwa kekuasaan dan jabatan seorang faqih Khomeini tidak sebesar Imam-Imam sebelumnya. Dalam pengertian, tingkat keImaman Khomeini adalah satu tingkat di bawah empat orang wakil Imam, atau dua tingkat di bawah Imam yang duabelas. Karenanya, ia *hanya* menempati posisi sebagai perwakilan umum. Untuk melihat posisi Khomeini dalam struktur Imamah, perhatikan bagan I berikut :

BAGAN 1

Transmisi Kekuasaan Menurut Syi'ah

(Sumber : Sihbudi, *Biografi*, h.145)

Kemudian bandingkan dengan bagan berikut ini :

BAGAN II

“Model Kekuasaan” *Vilayat-i Faqih*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

(Sumber : Sihbudi, *Biografi*, h.146)

Posisi demikian dapat dipahami, mengingat *penetapan* keImaman Khomeini tanpa bermaksud mengecilkan peran dan kedudukannya -tidaklah didasarkan pada penunjukan-. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa keImaman Khomeini ilegal dan tidak sah karena *menyalahi* mekanisme keImaman yang ada. Sebab, keberadaan Khomeini, terbukti mampu menyelamatkan hirarkhi keImaman yang nyaris dilupakan. Selain itu keImaman Khomeini juga terbukti dapat diterima oleh masyarakat Syi'ah, pengikut Imam duabelas. Dalam konteks demikian, Khomeini dengan *Wilayah Faqihnya* harus ditempatkan. Meski disadari bahwa gagasan serupa, yakni otoritas faqih, pernah muncul di lingkungan Syi'ah, yaitu abad ke-12 H. Akan tetapi, karena watak dan ruang lingkupnya yang masih terbatas pada masalah-masalah keagamaan, -itu pun masih dipertentangkan-, maka gagasan tersebut lenyap begitu saja, seolah tidak pernah ada.¹⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Upaya mewujudkan idealisasi politik Syi'ah yang telah dimodifikasi

Khomeini dalam pemikirannya tentang otoritas faqih, setidaknya di wilayah Iran, semakin mantap karena Madzhab Syi'ah Imamah Itsna 'Asyariyah telah berakar kuat di wilayah Persia ini jauh sebelum Revolusi Islam 1979, tepatnya sekitar abad ke-7 M, yaitu ketika Imam Husain ibn Ali (Imam ketiga) menikahi salah seorang putri raja Persi, Khosru Yazdajird.¹⁸ Akan tetapi pengaruh Syi'isme di Iran hilang begitu

¹⁷ Ahmad, *Masalah-masalah*, h. 130.

Lanjutan

saja karena kalah dengan dominasi politik mayoritas Sunni. Baru setelah Dinasti Safawi berkuasa (1501-1722 M) di wilayah ini kekuatan politik Syi'ah terwujud secara riil karena Syi'ah telah dijadikan madzhab resmi negara. Kecemerlangan politik Syi'ah itupun kemudian redup kembali seiring berakhirnya kekuasaan Safawi. Hal ini disebabkan Dinasti Qajar (1786-1926 M) dan rezim Pahlevi (1926-1979 M) yang secara berturut-turut menggantikan kekuasaan Dinasti Safawi, meskipun secara sosiologis tidak terlepas dari Syi'ah. Tetapi dalam ideologi politik dan riil politik, mereka telah jauh menyimpang bahkan memusuhi Syi'ah, seperti kebijakan Syah yang melarang Ulama (Mullah) melakukan kegiatan politik dan hanya boleh melakukan kegiatan keagamaan itupun disertai dengan pengawasan ketat. Sikap politik yang demikian inilah yang menyulut amarah mayoritas rakyat Syi'ah Iran. Rezim Syah -penguasa kedua dan terakhir dalam Dinasti Pahlevi- akhirnya kehilangan mahkota kekuasaannya akibat dari kebijakannya sendiri. Andai saja Syah lebih toleran dan lebih akomodatif terhadap Mullah, barangkali reaksi Khomeini tidak sedemikian agresif. Asumsi ini didasarkan pada sikap Khomeini sendiri, di mana pada awalnya, seperti terlihat pada bukunya *Kasyf al-asrar* (1941), bahwa ia masih bisa menerima keberadaan lembaga monarki konstitusional. Tetapi sikap Khomeini ini kemudian berubah (buku kedua, *al-Hukumat*

¹⁸ Selengkapnya, lihat Mahmud Shehaby, "Syi'ah", dalam Kenneth W. Morgan (ed.), *Islam Jalan Lurus* (Jakarta; Pustaka Jaya, 1980), h.227..

al-Islamiyah), yakni sama sekali menolak lembaga monarki. Perubahan sikap politik ini adalah sesuatu yang wajar, seiring dengan semakin menguatnya dukungan terhadap pemikiran politiknya.

Dasar pemikiran *keempat*, yang semakin mendesak diberlakukannya Wilayah Faqih pemikiran Khomeini ini adalah karena banyaknya anomali (penyimpangan) kekuasaan yang dilakukan oleh Syah Reza Pahlevi, baik dalam bidang ekonomi, sosial-budaya maupun politik sebagai eksekusi dari ambisi Syah Iran untuk mempercepat proses modernisasi negaranya, yang pada gilirannya berakibat pula pada proses de-Islamisasi, terutama di bidang sosial-budaya dan politik.

Sebagai gambaran dapat dikemukakan, modernisasi yang disertai dengan industrialisasi, di satu sisi, memang berhasil meningkatkan GNP (Gross National Product) perkapita Iran, dari US\$ 450 tahun 1971 menjadi US\$ 2.400 pada tahun 1978. Akan tetapi, karena industri yang dibangun rezim Syah adalah industri padat modal, bukan industri padat karya yang bisa menyerap banyak tenaga kerja, maka yang terjadi adalah semakin banyaknya pengangguran. Bahkan, secara keseluruhan, industri-industri tersebut hanya mampu menyerap 14,7 % dari seluruh jumlah penduduk usia kerja.¹⁹ Kondisi ini semakin bertambah buruk, karena banyaknya korupsi dan manipulasi di kalangan pembantu dekatnya dan tidak terlepas dari Syah

¹⁹ Sihbudi, *Dinamika*, h. 19.

sendiri dan keluarganya yang korup.²⁰

Di bidang sosial-budaya, modernisasi yang dipraktekkan Syah adalah westernisasi dan sekularisasi. Hal ini dapat dilihat pada kebijakan Syah yang berupaya mengurangi pengaruh agama Islam yang telah berakar kuat dikalangan rakyat. Di antaranya, ia mengubah penanggalan hijriyah (kalender Islam) dengan penanggalan Persi, serta memberikan keleluasaan bagi pengaruh budaya Barat.²¹ Sikap demikian mengakibatkan timbulnya kebencian rakyat dan mendorongnya untuk melakukan perlawanan.

Demikian pula dalam bidang politik, terutama terhadap kaum Mullah dan ajaran Islam, apa yang dilakukan Syah adalah sangat represif dan kejam. Tampaknya, yang ia inginkan tidak sekedar upaya memisahkan Mullah dari umatnya dengan membatasi gerakannya dan menangkapnya seperti yang dilakukan kepada Khomeini, pada tahun 1963, tetapi lebih sebagai upaya melenyapkan dasar-dasar Islam dari dunia Iran, seperti yang dilakukan zionis Yahudi Israel terhadap Palestina. Hal ini terbukti dengan adanya pembunuhan yang dilakukan militer atas perintah Syah

²⁰ Dalam bukunya, "The Fall Of The Syah" yang ditulis oleh Fereydoun Hoveida, dia menyebutkan bahwa kampanye melawan korupsi selalu didengungkan oleh Syah dan selama lima puluh tahun telah menjadi program pemerintah Iran, akan tetapi bagaimana mungkin kampanye melawan korupsi dapat berhasil, sementara Syah dan orang-orang yang disekelilingnya (terutama keluarga Syah) tetap melakukan apa yang telah mereka programkan. Lihat M. Amin Rais, *Cakrawala Islam Antara Cita Dan Fakta* (Bandung; Mizan, 1997), h.200.

²¹ Sihbudi, *Dinamika*, h.29-30.

terhadap ribuan orang-orang Syi'ah yang memprotes penangkapan Khomeini, serta penghancuran prasarana pendidikan seperti dihancurkannya Madrasah Faiziyah. Peristiwa yang terjadi pada 5 Juni 1963 itu, menurut Khomeini, dipandang sebagai tragedi terbesar setelah pembantaian Karbala yang menelan korban anak dan keturunan Ali. Dan pada tahun itulah, ribuan pemuda telah manjadi Syuhada', sebagaimana Husain dan Hasan .

Sementara itu, upaya memisahkan Ulama dari percaturan politik seperti yang dipraktekkan Syah itu sebenarnya inkonstitusional.²² Sebab, berdasarkan UUD 1906, kaum agama (Mullah) mempunyai posisi yang menentukan dalam kehidupan politik di Iran, di mana suatu majelis yang terdiri dari beberapa pemimpin agama mempunyai hak untuk memeriksa, dan membatalkan setiap UU yang dihasilkan oleh parlemen, bisa bertentangan dengab Syari'at Islam. Akan tetapi, setelah terjadi percobaan kudeta, yang dilakukan oleh Mossadeq, Syah kemudian menghapus UU tersebut, bahkan merubah sistim pemerintahan, dari monarki konstitusional -di mana Khomeini pernah mendukung sistim ini, 1941-, menjadi monarki absolut. Sementara parlemen, hanya bisa mengiyakan keputusan Syah, karena sebelumnya telah dikuasainya²³. Keangkuhan Syah ini semakin tidak terkontrol lagi, karena

²² Konstitusi 1908, berdasarkan konstitusi Belgia pada dasarnya masih berlaku sampai tahun 1979. Edward Mortimer, *Islam Dan Kekuasaan*, terj. Ena Hadi dan Rahmani Astuti (Bandung ;Mizan, 1984), h.286.

²³ Sihbudi, *Dinamika*, h.26-27.

Amerika selalu mendukung setiap apa yang ditetapkan Syah. Di antara bukti dukungan Amerika, adalah ucapan presiden Jimmy Carter pada tahun 1977, dengan mengatakan : "*Iran under the great leadership of the Syah is an island of stability in one of the more troubled areas of the world.*"²⁴ (Iran dibawah pemerintahan Syah merupakan kawasan paling aman di dalam wilayah yang bergejolak di dunia).

Pendek kata, lahirnya konsep *Wilayah Faqih* itu, disamping dilatar belakangi persoalan ideologis-politis juga disebabkan persoalan sosial-budaya dan ekonomi yang terakumulasi menjadi satu, atau yang lazim disebut dengan *necessary condition*. Secara kebetulan di tengah-tengah kegagalan dan pergumulan politik itu terdapat figur Khomeini yang kharismatis, cerdas dan concern terhadap persoalan umatnya (Syi'ah), sehingga ia berhasil mengakomodir berbagai persoalan itu ke dalam satu titik, yaitu dengan mempraktikkan lembaga Imamah yang telah dimodifikasi. Itulah *Wilayah Faqih*.

C. Pemikiran Politik Ayatullah Khomeini.

Pemikiran politik Khomeini baru dipublikasikan untuk pertama kalinya pada tahun 1941, yaitu dalam bukunya yang berjudul *Kasyf al-Asrar*. Buku *Kasyf al-Asrar*

²⁴ Tentang mengapa Amerika begitu setianya mendukung setiap kebijakan Syah itu didasarkan pada pertimbangan politis dan ekonomis. Karena Amerika saat itu adalah negara pemasok senjata terbesar bagi Iran, sementara Iran, adalah pemasok minyak terbesar bagi kepentingan Amerika. Demikian pula, Iran adalah sekutu Amerika yang dijadikan pioner melawan Sovyet Karena itulah Khomeini melihat Syah adalah agen Yahudi Amerika untuk menghancurkan Islam. Sihbudi, *Dinamika*, h. 27-28 dan 132-133.

ini pada intinya berisi tiga hal penting, yaitu: *pertama*, serangan tajam terhadap kebijakan Syah Reza yang menjalankan kekuasaannya dengan tangan besi dan begitu antipatinya terhadap Ulama. Dalam situasi yang demikian inilah, Khomeini menegaskan: “Pada periode ini, orang pada egois, lemah dan melempem sehingga mereka tidak mampu menghadapi kediktatoran Syah Reza.”²⁵

Inti yang *kedua* dari buku tersebut adalah jawaban terhadap buku *Secrets of Thousand Years* yang ditulis oleh gerakan *Pak Dini*-nya Ahmad Kasravi, di mana gerakan ini selalu melancarkan serangan terhadap Mullah dan mazhab Syi’ah yang dituduh sebagai sumber keterbelakangan Iran. Khomeini yang pada saat itu sudah berumur 39 tahun dan sudah bergelar Hujjah al-Islam, tentu saja berkewajiban untuk membantah tuduhan keji tersebut. Sebab, dibalik gerakan ini adalah Reza Syah tujuan utamanya memisahkan Ulama dan Syi’ah dari komunitas rakyat Iran. Padahal mayoritas rakyat Iran adalah penganut madzhab Syi’ah Imamiyah yang telah memiliki akar yang kuat dalam sejarahnya. Karenanya, serangan yang dilakukan oleh gerakan Kasravi tersebut hanya semakin membangkitkan kebencian rakyat terhadap Dinasti Pahlevi, yang sekaligus semakin mengokohkan keberadaan Khomeini ditengah rakyat yang tertindas. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan, bila semakin hari, semakin banyak yang menghadiri ceramah Khomeini, yang saat itu dipusatkan di Madrasah Faiziyah.

²⁵ Khomeini, “*Kasyf al-Asrar*” sebagaimana dikutip oleh Baqir Mo’in dalam Ali Rahnama (ed), h.81.

Inti *ketiga*, adalah kritik pedas Khomeini kepada kaum Syi'ah yang apatis terhadap situasi sosial-politik. Untuk itu ia menyerukan kepada kaum Mullah agar melibatkan diri dalam politik dan menyelamatkan integritas kultur Syi'ah di Iran. Menurutnya, kaum Ulama harus mengendalikan pemerintah, tetapi, "tidak berarti kaum Ulama harus menjadi Syah, seorang menteri, atau panglima militer..... namun Ulama harus mampu mengawasi badan-badan legeslatif dan eksekutif dalam sebuah negara Islam". Harus diingat pula, demikian Khomeini menegaskan, bahwa konsep pemisahan agama dan negara itu adalah ulah agen-agen kolonialis yang dijejalkan ke dalam otak kaum muslim untuk mencegah kaum muslimin meraih kemerdekaan dan kebebasan, untuk mencegah kaum Mullah bermain dalam politik. Padahal Nabi Muhammad adalah seorang juga politikus dan pimpinan negara.²⁶

Dari paparan tersebut dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa sejak tahun 1940-an, Khomeini sudah melemparkan gagasan perlunya keterlibatan kaum Ulama dalam politik *pemerintahan*. Hanya saja pada saat itu, belum dijelaskan, bagaimana bentuk pengawasan Ulama terhadap pemerintahan itu. Jawaban dari gagasannya itu akhirnya dijelaskan pada buku *Hukumat-i Islami* (pemerintahan Islam) yang terbit pada tahun 1972 dan merupakan karya monumental kedua Ayatullah Khomeini, sekaligus sebagai penyempurna dari karya sebelumnya, *Kasyf al-Asrar*.

²⁶ Lihat, Sihbudi, *Dinamika*, h.52-53.

Ada empat tema esensial dari buku Khomeini tersebut. *Pertama*, kritik tajam terhadap lembaga monarki, meski telah ada konstitusi. *Kedua*, bahwa negara Islam, yang didasarkan pada Qur'an dan dibentuk setelah umat Islam diperintah oleh Nabi pada abad ketujuh, bukan merupakan suatu gagasan yang hanya bisa dicapai jauh di masa depan, tetapi sebagai bentuk pemerintahan yang praktis dapat direalisasikan seumur hidup pada generasi sekarang. *Ketiga*, bahwa Ulama memegang peranan penting dalam kepemimpinan umat Islam. Sebagaimana diungkapkan Khomeini, "Dalam suatu kondisi tidak memungkinkan (bagi faqih) untuk membentuk pemerintahan, maka Wilayah itu tidak gugur, sebab para faqih telah diangkat oleh Allah sebagai wali (ulil amri)".²⁷ *Keempat*, bahwa umat Islam harus berjuang melawan setiap bentuk penindasan dan tirani.²⁸

Jika dua karya Khomeini ini di bandingkan, ada semacam evolusi pemikiran politik. Dalam *Kasyf al-Asrar* misalnya, Khomeini menganggap Ulama cukup berperan sebagai *pengawas* lembaga-lembaga politik, tetapi dalam *Hukumat-i Islami* secara tegas ia mengatakan bahwa para faqih (Ulama) mempunyai hak dan kewajiban sebagai *penguasa* dalam negara Islam. Lebih dari itu, bila dalam buku yang pertama Khomeini masih bisa menerima keberadaan lembaga monarki konstitusional, maka dalam buku kedua, dia secara tegas menolak sistem monarki.

²⁷ Khomeini, *al-Hukumah al-Islamiyah*, (Najaf, TTh) h.52.

²⁸ Sihbudi, "Tinjauan Teoritis", h.79.

Baginya hanya ada satu sistim pemerintahan yang sesuai dengan Islam, yaitu pemerintahan Islam yang dipimpin oleh seorang faqih atau dewan fuqaha'. Sebab sebagaimana telah diketahui, bahwa kekuasaan faqih tersebut pada hakikatnya adalah kelanjutan dari kekuasaan para Imam setelah *masa kegaiban besar*, yaitu masa sesudah meninggalny keempat wakil Imam sampai kedatangan kembali al-Mahdi pada akhir zaman (lihat bagan I). Satu-satunya perbedaan antara Imam dan faqih, adalah bahwa faqih tidaklah memiliki sifat 'Ismah.²⁹ Oleh karena itu, tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa keberhasilan Khomeini menerapkan Wilayah Faqih menggantikan sebuah pemerintahan monarki absolut merupakan sebuah *cetak biru* bagi suatu reorganisasi masyarakat, dan menjadi *handbook* bagi Revolusi Islam Iran.³⁰

Pemikiran politik Imam Khomeini tentang *Wilayah Faqih* ini adalah menginginkan berdirinya *pemerintahan Islam yang berarti pemerintahan rakyat dengan berpegang pada hukum Tuhan, sebab Tuhan adalah satu-satunya pembuat undang-undang.*³¹ Sebagai ganti badan pembuat undang-undang dibentuklah *dewan perencana* untuk mengawasi hasil kerja berbagai departemen. Tetapi harus diingat, bahwa kepala pemerintahan, pemimpin tertinggi haruslah dipegang seorang

²⁹ Enayat, *Reaksi*, h.8.

³⁰ Sihbudi, "Tinjauan Teoritis", h.77.

³¹ Sihbudi, "Bahasa Politik", h.47

faqih, seorang ahli dalam hukum Islam. Dalam konteks inilah, Momen mengatakan, kendati masalah-masalah teknis bisa di serahkan pada ahlinya, namun pemegang kekuasaan tertinggi di bidang sosial-politik juga agama harus berada di tangan *faqih yang adil*.³²

Pemikiran politik Khomeini yang terkesan idealis dan filosofis ini, kiranya dapat dimengerti, mengingat dalam idiologi Syi'ah (duabelas) terdapat satu keyakinan tidak dapat dipisahkannya Islam dengan politik. Menurutnya, sebagaimana juga pemikiran Ali Syari'ati, seorang pemikir Syi'ah yang sekaligus ideolog Revolusi Iran- percaya, bahwa gaibnya al-Mahdi tidak berarti berhentinya peran politik umat Syi'ah. Karenanya, dalam rangka membangun masyarakat dan negara, kaum muslim tidak boleh menunggu sampai kembalinya al-Mahdi. Seiring dengan itu, maka harus dibentuk pemerontahan Islam yang adil yang dipimpin para *faqih*. Mengapa harus para *faqih*? Sebab mereka inilah yang diyakini kaum Syi'ah sebagai wakil Imam setelah gaibnya Imam terakhir. Hanya saja saja perlu ditambahkan, bahwa para wakil Imam itu adalah dipilih oleh rakyat.³³

Karena paera *faqih* adalah wakil Imam, maka tugas dan fungsinya adalah sebagaimana tugas para Imam. Jika para Imam berkewajiban membimbing umat

³² Momen, *An Introduction*, h.196.

³³ Lihat Fathi Osman, "Bai'ah al-Imam ; Kesepakatan pengangkatan Kepala Negara Islam", dalam Mumtaz Ahmad (ed), h.83-87 dan 94-95.

setelah berakhirnya *siklus wahyu*, artinya setelah wafatnya Rasulullah yang terakhir, maka para faqih berkewajiban membimbing umat setelah berakhirnya *siklus Imamah*, yaitu setelah tiadanya Imam, dengan perbedaan tentu saja, bahwa faqih tidak memiliki sifat 'Ismah³⁴ sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Selain 'Ishmah, ada satu hal yang perlu ditegaskan berkenaan dengan teori *Wilayah Faqih* ini yaitu bahwa, dalam teori ini terlihat unsur perwakilan rasional berdasarkan pilihan rakyat, yang berbeda dengan Imam karena keberadaannya diangkat langsung oleh Allah SWT. Tetapi faktor utama kekuasaan individual seorang pemimpin kharismatis tetap tidak berubah.

Sementara itu, kepedulian seorang faqih berkaitan dengan negara dan pemerintahan, dalam pandangan Bernard Lewis, "bukanlah pada abstraksi filosofis mengenai posisi faqih atau fenomenanya di dalam sejarah", meskipun jelas bahwa ia sadar akan kedua aspek itu, (tetapi) seorang faqih dalam melihat negara dan pemerintahan, terutama sebagai perangkat yang bersifat sakral ; sebagai bagian yang niscaya dan inheren dari ketetapan atau takdir Tuhan yang telah diturunkan pada umat manusia. Artinya, seorang faqih dalam kapasitasnya sebagai pengendali pemerintahan di bimbing oleh Syari'at; hukum suci dalam Islam yang mencakup seluruh ruang lingkungan aktifitas manusia, dan dengan demikian secara alamiah

³⁴ Dalam Syi'ah Imamiyah ada 14 orang yang Ma'sum, yaitu :Nabi Muhammad SAW, Fatimah dan duabelas Imam. Mereka itulah yang disebut sebagai "empat belas manusia suci" .Lihat, MH.Thabataba'i, *Inilah Islam; Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam Secara Mudah*, terj. Ahsin Muhammad (Bandung; Pustaka Hidayah, 1996), h.120.

berhubungan dengan tingkah laku pemerintahan dalam segala aspeknya. Karena hukum, dalam konsepsi seorang muslim bersifat sakral dan tak dapat diubah, maka bagian-bagiannya yang berkenaan dengan pemerintahan juga bersifat sakral. Dalam kaitan inilah, seorang faqih menurut pandangan Lewis, bukan untuk melakukan spekulasi, apalagi melakukan inovasi, melainkan untuk memformulasikan dan jika dianggap perlu, menafsirkan aturan-aturan eksplisit dan menjabarkan prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadits-Hadits Nabi.³⁵ Dalam kerangka inilah, ijtihad para faqih itu ditempatkan.

Selanjutnya, dalam konsep *Wilayah Faqih* kaum Ulama menduduki posisi, baik sebagai pengawal (guardians/wali), penafsir (interpreters) maupun pelaksana (executors) hukum-hukum Tuhan. Oleh sebab itu, pemerintahan yang ada, dibawah kendali para faqih merupakan pemerintahan Islam yang sebenarnya. Kendati tidak ada aturan khusus di dalam al-Qur'an dan Hadits yang menetapkan faqih bagi tegaknya suatu pemerintahan selama kegaiban al-Mahdi dan tertibnya tatanan sosial bagi pelaksanaan hukum Islam.³⁶

Menurut Khomeini, pemerintahan Islam harus ada dan dijamin keadilannya, dan berjalan sesuai dengan Syari'at agama. Hal demikian hanya bisa dipenuhi oleh para faqih di mana faqih berdiri sebagai pemegang otoritas hukum yang paling tinggi

³⁵ Lewis, *Bahasa*, h.39.

³⁶ Sihbudi, "Bahasa politik", h.48

dalam negara -sejenis Mahkamah Agung Konstitusional- dengan kekuasaan untuk menyatakan tidak sahnya suatu tindakan pemerintah atau perundangan yang dikeluarkannya jika dipandang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks semacam ini, Lewis memberikan komentar, "Tidak ada preseden bagi kelembagaan seperti itu di dalam sejarah Islam, baik secara doktrinal maupun praktis".³⁷ Nampaknya, Lewis sependapat dengan gagasan politik Khomeini ini, paling tidak, ia berpandangan positif dan netral. Karena posisinya sebagai penguasa, faqih memiliki otoritas yang sama dan dapat menjalankan fungsi sebagai Imam, walaupun ia dengan tidak sendirinya sama dengan Imam.

Begitu seorang faqih berhasil membangun sebuah pemerintahan Islam, maka rakyat dan para faqih lain wajib mengikutinya. Sebab, ketaatan kepada faqih adalah suatu keniscayaan karena statusnya sebagai penerus Imam, sementara Imam adalah penerus Nabi. Dengan demikian, keberadaan faqih telah diakui. Selanjutnya, ia akan memiliki *kekuatan dan otoritas pemerintahan yang sama sebagaimana yang dimiliki Nabi dan para Imam terdahulu.*

Tetapi, tidak setiap faqih dianggap qualifaed sebagai pemimpin. Sebab, menurut Khomeini, sekurang-kurangnya ada delapan persyaratan yang harus dipenuhi seorang faqih untuk bisa memimpin sebuah pemerintahan Islam, yaitu : (1) mempunyai pengetahuan yang luas tentang hukum Islam; (2) harus adil, dalam arti memi-

³⁷ Lewis, *Bahasa*, h.48.

liki iman dan akhlaq yang tinggi; (3) dapat dipercaya dan berbudi luhur; (4) jenius; (5) memiliki kemampuan administrasi; (6) bebas dari segala pengaruh asing; (7) mampu mempertahankan hak-hak bangsa, kemerdekaan dan integritas teritorial tanah Islam, sekalipun harus di bayar dengan nyawanya; dan (8) hidup sederhana.³⁸

Ketatnya kriteria kepemimpinan faqih seperti ini, nampaknya dimaksudkan demi tegaknya suatu pemerintahan Islam yang adil, merdeka dan penuh dengan moralitas. Akan tetapi, sepeninggal Khomeini (meninggal 1989), persoalan kriteria ini menimbulkan perdebatan, bukan semata-mata pada ketatnya persyaratan, tetapi lebih pada *tidak adanya* faqih setingkat Khomeini, meskipun akhirnya dapat diselesaikan, tentu saja dengan sedikit kelonggaran. Diantara kelonggaran itu adalah dimasukkannya Majelis Pakar dan Majelis Permusyawaratan Islam dalam struktur pemerintahan Iran (setelah amandemen 1989) yang bertugas mendampingi presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini akan dibahas tersendiri dalam kajian berikut ini.

D. Institusi Wilayah Faqih : Model Pemerintahan Islam

Untuk menjamin terlaksananya gagasan politik Khomeini, yakni *model kekuasaan Wilayah Faqih*, serta demi tegaknya kehidupan bernegara, mutlak diperlukan suatu konstitusi. Untuk menghasilkan konstitusi sesuai yang diharapkan,

³⁸ Sihbudi, "Tinjauan Teoritis" h.78.

diperlukan langkah-langkah strategis. Untuk kepentingan itulah langkah pertama yang dilakukan ialah membentuk Dewan Revolusi Iran (DRI) dimana tugas utamanya adalah sebagai lembaga legislatif yang dirumuskan menjadi : (a) membuat rancangan UUD sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Wilayah Faqih, (b) mempersiapkan referendum, (c) membentuk pemerintahan sementara, (d) mengontrol jalannya pemerintahan sementara.

DRI yang beranggotakan 20 orang ini, terdiri dari dua kelompok., yaitu : 15 orang kelompok Mullah yang merupakan pembantu dekat Khomeini, dan 5 orang kelompok nasionalis nonMullah. Dari kelompok Mullah antara lain ialah Ayatullah Dr. Bahesti (ketua), Ayatullah Muthahhari, Hujjatul Islam Hasyemi Rafsanjani, Ayatullah Ardebili, Muhammad Javad Mir Hussein Mussavi dan Ali Khamenei. Sedang kelima orang nonMullah (nasionalis), yaitu Dr. Mehdi Bazargan, Ghotbzadeq, Dr. Ibrahim Yazdi, Bani Sadr serta Laksamana Madani.³⁹

Dari komposisi DRI ini (15:5) jelas terlihat bahwa Khomeini (Mullah) berupaya merangkul kelompok nasionalis untuk bersama-sama membangun Iran, sebab bagaimanapun kelompok nasionalis ini *telah berjasa* dalam Revolusi Iran. Di sinilah menariknya karena Khomeini yang selama ini terkenal radikal dan tidak ada

³⁹ DRI ini sebenarnya telah terbentuk tiga bulan sebelum kejatuhan Syah, tetapi dengan pertimbangan pilitis, baru diumumkan secara resmi pada 11 Januari 1979, sementara Syah turun tahta 11 Februari 1979. Lihat Sihbudi, *Dinamika*, h. 65-66.

kompromi ternyata *bisa kerja sama* dengan kelompok lain, atau hal ini hanya merupakan taktik Khomeini saja.

Konstitusi Republik Islam Iran 1979, barangkali merupakan satu-satunya undang-undang dasar di dunia ini yang secara eksplisit mencantumkan *Wilayah Faqihnya* Ayatullah Khomeini. Bahkan, tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa konstitusi itu merupakan perwujudan dari gagasan Khomeini. Dalam hal ini *Wilayah Faqih* secara struktural membawahi seluruh lembaga, baik legeslatif, eksekutif maupun yudikatif. Untuk mengetahui *Wilayah Faqih* dalam struktur konstitusi Iran, perhatikan bagan berikut ini :

BAGAN III

Struktur Politik Iran Berdasarkan Konstitusi 1979

(Sebelum Amandemen 1989)

(Sumber : Sihbudi, "Tinjauan Teoritis", h.81)

Masuknya *Wilayah Faqih* dalam konstitusi adalah sebagai indikator bahwa konsep tersebut bisa diterima oleh masyarakat Syi'ah Iran. Lebih dari itu, dengan posisi yang demikian strategis, maka cita-cita mendirikan pemerintahan Islam di bawah naungan Imam terwujud sudah. Hal demikian, tidak lepas dari peran besar yang dimainkan Khomeini, pendiri Republik Islam Iran.

Sebelum sampai pada bagian-bagian penting dari konstitusi 1979 itu, ada baiknya sedikit di singgung pandangan Khomeini tentang pengertian konstitusional dan negara hukum. Menurutnya, negara Islam adalah negara hukum, dan pemerintahan Islam adalah pemerintahab konstitusional. Namun menurut pandangan Khomeini, pengertian konstitusional dan negara hukum disini berbeda dengan apa yang selama ini dikenal. Pengertian konstitusional yang merujuk pada *hukum yang disesuaikan dengan pendapat mayoritas* tidak dikenal dalam sistim pemerintahan Islam. Karena, dalam pemerintahan Islam hukum sudah ada, yaitu hukum Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan-lah pemegang kekuasaan legislatif, di samping sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang sebenarnya. Jadi, pemegang kekuasaan legislatif bukan pada parlemen⁴⁰ (perhatikan kembali bagan III).

Dalam struktur pemerintahan Iran berdasarkan konstitusi 1979, posisi tertinggi adalah *Tauhid*, dengan pengertian, bahwa seluruh sistim yang berlaku dalam pemerintahan itu adalah dalam kerangka mentauhidkan Sang pemilik hukum dan

⁴⁰ Sihbudi, "Bahasa Politik", h.48.

keadilan hakiki, yakni Allah SWT. Atau, seluruh produk pemerintahan itu harus dilandasi dan dijiwai dengan nilai tauhid yang sesungguhnya. Di bawah tauhid, berturut-turut tercantum *al-Qur'an al-Karim*, sebuah sumber dari segala sumber hukum, kemudian *Nubuwwah* yang berfungsi memperjelas, melalui kehadiran seorang Nabi utusan Allah. Untuk mengawal hukum dan kekuasaan Ilahi (guardians/wali); untuk menafsirkan (interpreters) dan melaksanakan (executors) hukum-hukum tersebut, lembaga *Imamah-lah* yang tampil kedepan. Sementara Imamah telah berakhir. Selanjutnya tugas tersebut dijalankan oleh *Wilayah Faqih*, dan dibantu oleh beberapa departemen (lembaga pemerintahan) yang kesemuanya bertanggung jawab kepada *Wilayah Faqih*.

Jelasnya, didalam pemerintahan Islam, jika kekuasaan kekuasaan eksekutif dan yudikatif ada pada faqih atau para fuqaha' (dewan faqih) dan menjalankan fungsi selaku wakil para Imam, maka kekuasaan legislatif sepenuhnya menjadi hak Tuhan. Oleh sebab itu, pemerintahan Islam juga bisa disebut *sebagai pemerintahan hukum Tuhan atas manusia*, tetapi, bukan berarti tidak diperlukan adanya parlemen. Parlemen (majelis) diperlukan guna *menyusun* program untuk berbagai kementerian berdasarkan ajaran Islam dan menentukan bentuk-bentuk pelayanan pemerintahan di seluruh negeri.⁴¹ Dari logika politik seperti ini, terlihat, bahwa Khomeini, disamping menggunakan pola pikir idealis-pragmatis juga bersikap

⁴¹ Azzam, *Beberapa Pandangan*, h.128.

realistis. Dalam arti, karena bagaimanapun pemerintahan Islam itu adalah untuk menciptakan tatanan dan layanan kepada masyarakat Islam, maka ketertiban rakyat yang terwakili dalam parlemen tetap diperlukan. Di sinilah letak satu keunikan pemerintahan Islam Iran, yang disebut dengan *model kekuasaan Wilayah Faqih*.

Selanjutnya, sesuai dengan tujuan misinya, pemerintahan Islam memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- (1) Memepertahankan lembaga-lembaga dan hukum Islam.
- (2) Melaksanakan hukum Islam.
- (3) Membangun tatanan Islam.
- (4) Memungut dan memanfaatkan pajak sesuai dengan ajaran agama.
- (5) Menentang segala bentuk agresi, mempertahankan kemerdekaan dan integritas teretorial tanah Islam.
- (6) Memajukan pendidikan.
- (7) Memberantas korupsi dan segala jenis penyakit sosial lainnya.
- (8) Memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga negara tanpa diskriminasi.
- (9) Memecahkan masalah kemiskinan.
- (10) Memberikan pelayanan kemanusiaan secara umum.⁴²

Dari rumusan tersebut, terlihat jelas, bagaimana concern-nya pemerintahan Islam di bawah kekuasaan faqih itu terhadap masalah-masalah hukum dan kemanusiaan, di mana kedua hal ini acapkali terabaikan, justru pada pemerintahan modern yang

⁴² Sihbudi, "Tinjauan Teoritis", h. 79.

sering mengklaim dirinya sebagai pemerintahan yang dibangun atas ketetapan hukum.

Kembali keada konstitusi 1979, pada bagian pembukaan antara lain tertulis :

“Rencana Pemerintahan Islam yang berdasarkan Wilayah Faqih yang di wakili oleh Imam Khomeini”. “Bahwa prinsip-prinsip Wilayah al-Amr dan ke pimpinan yang terus-menerus, maka konstitusi mempersiapkan lahan bagi terwujudnya kepemimpinan oleh faqih.....”⁴³

Atas dasar suatu *reinterpretasi Revolusi* dari konsep *Wilayah Faqih*, maka Ulama yang memegang tampuk kekuasaan di identifikasikan sebagai *Waliyu al-Amr*, (Ulil Amri) dan jabatan tertingginya diidentifikasikan sebagai *kepemimpinan* (rahbari). Pasal II konstitusi 1979 misalnya, menyebutkan Republik Islam sebagai suatu tatanan yang berdasarkan keyakinan pada :

“(pasal 1):Tauhid, kemaha kuasaan-Nya dan Syari’at-Nya hanyalah milik-Nya semata-mata serta kewajiban mentaati perintah-Nya.....” (pasal 5): Imamah dan kelanjutan kepemimpinan, serta peranan fundamentalnya demi kelanggengan Revolusi Islam”⁴⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Draft pertama konstitusi Republik Islam Iran disusun pada Juni 1979 oleh Majelis Mu’assasin (majelis konstitusi) yang dibentuk berdasarkan dekrit Ayatullah Khomeini. Para anggota Majelis Mu’assasin yang kemudian diubah menjadi Majelis Khubregan (Majelis Ahli) -lihat bagan IV (setelah amandemen)- adalah satu di

⁴³ Sihbudi, *Biografi*, h.138.

⁴⁴ Seluruh pasal dalam konstitusi Iran tertuang dalam buku Said Amir Arjomand, “Ideological Revolution in Shi’ism” dalam *Authority and Political Culture in Shi’ism*, Editor S. A. Arjomand (Albany ; State University of New York Press, 1988), h.371-382.

antara tiga lembaga tinggi negara yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Perlu diketahui, di Iran sedikitnya ada tiga lembaga tinggi nrgara yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. *Pertama*, adalah parlemen yang seluruh anggotanya dipilih oleh rakyat. *Kedua*, presiden yang juga dipilih dalam pemilihan umum yang bersifat langsung oleh rakyat. *Ketiga*, adalah Dewan Ahli atau Majelis Pakar (Majelis Khubregan), yakni satu dewan yang beranggotakan sekitar 83 orang dari kalanga Ulama senior yang bertugas memilih wali faqih atau dewan fuqaha'.⁴⁵ Dalam praktek politik di negri Mullah yang berumur relatif sangat muda ini -terhitung dari Revolusi 1979-, banyak dilakukan upaya yang kondusif bagi pendidikan dan penyadaran politik rakyat. Ini membuktikan, - dilihat dari teori politik modern saat ini, di mana demam demokrasai melanda dunia- Iran, negara yang sering dipandang dengan sebelah mata ternyata mampu menerapkan teori politik yang sangat demokratis. Fakta terbaru yang mendukung analisa ini, adalah pemilihan umum yang berhasil menempatkan Mohammad Khatami, seorang tokoh moderat non Mullah sebagai presiden kelima Iran.⁴⁶

⁴⁵ Keterangan lebih lanjut lihat, Riza Sihbudi, "Politik, Partai Dan Oposisi Di Iran Pasca - Revolusi", *Jurnal Ilmu Politik* II (Jakarta; Gramedia, 1992) h. 36-37 atau Riza Sihbudi dkk, *Profil Negara-negara Timur Tengah* (Jakarta; Pustaka Jaya, 1995), h.91.

⁴⁶ Sejak 1979, Iran telah lima kali berganti presiden, yaitu (1) Bani Sadr (1980-sampai dipecat pada 1981 karena dinilai pro Barat; (2) Ali Raja'i (tewas pada 1981) ; (3) Ali Khameini (1981-1985, 1985-1989) ; kemudian : (4) Hasyemi Rafsanjani (1989-1993, 1993-1997); dan (5) Mohammad Khatami (1997).

Untuk memperoleh gambaran secara jelas tentang ketiga lembaga tinggi negara yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, serta beberapa perubahan (amandemen) dari konstitusi 1979, perhatikan bagan IV berikut ini :

BAGAN IV

**Struktur Politik Iran Berdasarkan Konstitusi 1979
(Setelah Amandemen 1989)**

Para anggota majelis permusyawaratan Islam, seluruhnya berjumlah 270 Orang.⁴⁷ Ketika bersidang untuk membahas penyempurnaan konstitusi itu memperkenalkan pembaharuan penting yang mengubah sifat dasar konstitusi secara fundamental dengan memasukkan pasal 5 mengenai posisi dan kelanjutan *Wilayah Faqih*. Pasal itu berbunyi sebagai berikut :

“Sepanjang kegaiban Imam segala zaman (sampai Tuhan mempercepat penjelmaannya yang diperbarui), pemerintah dan kepemimpinan bangsa ada di tangan faqih yang adil yang alim, paham tentang keadaan zamannya, berani, bijaksana dan memiliki kemampuan administratif. Pada saat tidak ada faqih yang sangat dikenal oleh mayoritas, maka suatu dewan kepemimpinan yang terdiri dari fuqaha’ yang memiliki kecakapan seperti di atas, akan memikul tanggung jawab sesuai dengan pasal 107”

Sedangkan pasal 107 UUD RII menyebutkan :

“ Bahwa dalam hal tidak ada seorang yang dianggap tepat untuk menggantikan Khomeini, maka harus dibentuk suatu dewan kepemimpinan (council of leadership) yang terdiri dari tiga atau lima orang Ulama untuk menggantikan Khomeini”

Pasal ini nampaknya dimaksudkan sebagai langkah antisipasi untuk menghindari perpecahan bila sewaktu-waktu Khomeini telah tiada, sebab saat itu Khomeini telah berusia 80 tahun.⁴⁸

⁴⁷ Sihbudi, “Politik, Partai”, h.34.

⁴⁸ Sihbudi, *Dinamika*, h.64.

Selanjutnya kriteria Dewan Kepemimpinan yang dikehendaki pasal 107 tersebut ditambahkan berdasarkan amandemen pada 24 April 1989, yang berbunyi :

“(1) Memenuhi persyaratan dalam hal keilmuan dan kebijakan yang esensial bagi kepemimpinan agama dan pengeluaran fatwa; (2) berwawasan sosial, berani, berkemampuan dan mempunyai cukup keahlian dalam pemerintah”.

Wilayah Faqih, menurut pasal 110, diberi tugas dan wewenang untuk :

“Menunjuk fuqaha pada Dewan Perwalian (Shuraye Nigahban), wewenang pengadilan tertinggi, untuk mengangkat dan memberhentikan panglima tertinggi angkatan bersenjata, dan panglima tertinggi pasukan pengawal Revolusi Islam, untuk menyatakan kelayakan calon-calon presiden dan untuk memberhentikan presiden republik berdasarkan pada rasa hormat terhadap kepentingan negara”.

(Perhatikan kembali bagan IV). Demikianlah, *model kekuasaan Wilayah*

Faqih ini boleh dipandang sebagai terobosan yang bisa mencairkan kebekuan persepsi, bahwa dalam sistem politik itu seolah tidak ada pilihan ketiga, kecuali *monarki, teokrasi dan demokrasi*. Melihat partisipasi rakyat dalam proses politik sangat besar, tidaklah menunjukkan bahwa Iran pada masa ini menggunakan sistem politik demokrasi, dalam arti bahwa kedaulatan tinggi berada di tangan rakyat (tahta otoritas). walaupun partisipasi rakyat mendapat porsi yang begitu besar, tetapi mereka dibatasi oleh hukum-hukum Syari'at Islam, yang merupakan pedoman

tertinggi dan harus dita'ati oleh semua umat Islam. Sistem politik Syi'ah ini, tidak dapat dikategorikan sebagai sistem demokrasi. Sebab, dalam kenyataannya rakyat tidak bebas berkehendak, tetapi dibatasi oleh Syari'at Islam. Demikian pula sistem politik yang berjalan di Iran pada saat ini, tidak dapat dikatakan sebagai sistem teokrasi. Sebab dalam prakteknya rakyat diikutsertakan dalam perpolitikan. Oleh karena itu, sesungguhnya sistem politik yang ada di Iran sekarang itu merupakan gabungan antara sistem teokrasi dan sistem demokrasi, yang disebut dengan sistem *teodemokrasi*.

Namun demikian, perlu disadari sebagai, gagasan besar, konsep ini juga mengandung kelemahan dan kekurangan. Di antaranya adalah soal kriteria faqih yang bisa diangkat sebagai pemimpin, jelas tidak mudah (bahkan sangat sulit). Hal ini terlihat sesudah wafatnya Ayatullah Khomeini. Kendati proses pemilihan Ayatullah Ali Khamenei berjalan cukup mulus, namun banyak kalangan menilai, bahwa *kelas* Ali Khamenei masih *jauh di bawah* tokoh yang digantikannya. Meskipun demikian, tidak terjadi gejolak sebagaimana yang diramalkan (dikehendaki) Barat.

Sementara itu, bagi para pengkritik dan pengecamnya, -yaitu para tokoh nasionalis liberal, seperti Mehdi Bazargan, Abol Hasan, Bani Sadar- , menilai bahwa konsep Wilayah Faqih termasuk telah memberikan peranan yang terlalu besar pada ulama yang tidak lain adalah Khomeini sendiri dalam urusan kenegaraan. Hal ini dapat mengakibatkan kekuasaan sulit dikontrol, dan tingkat partisipasi politik rakyat

sangat rendah. Padahal dalam sistem politik demokrasi, kontrol terhadap kekuasaan dan partisipasi politik rakyat, merupakan dua unsur yang sangat dominan.

Terlepas dari benar atau tidaknya kritik tersebut, yang jelas pada konstitusi Iran terutama setelah Amandemen (1989) sudah ada beberapa revisi, sesuai dengan tuntutan demokrasi. Misalnya, penghapusan Perdana Menteri, penambahan pasa 107 sebagaimana tersebut di atas, serta memperjelas tugas dan fungsi pada tiap-tiap bidang (Majelis). Dengan demikian, *over laping* antara presiden dan perdana menteri misalnya, (bagan II; sebelum amandemen), tidak lagi terjadi, sebab disamping jabatan perdana menteri sudah dihapuskan, dan digantikan Dewan Menteri, toh dalam struktur kekuasaan, keduanya jelas berbeda. Bila presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu, sementara Dewan Menteri ditunjuk oleh Majelis Permusyawaratan Islam (Islamic Consultative Assembly; Parlemen) yang anggotanya berjumlah 270 orang, dengan demikian pertanggung-jawabanpun juga berbeda. Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat dan Wali Faqih, sementara Dewan Menteri (Council of Minister's) bertanggung jawab kepada parlemen. (Perhatikan bagan IV).

Disamping itu, ada hal lain yang menarik dan perlu diperhatikan, yaitu mulai munculnya interpretasi baru terhadap teori *Wilayah Faqih*, sehingga konsep ini bisa lebih demokratis. Interpretasi baru itu diantaranya dilakukan oleh seorang Ulama Syi'ah, Ayatullah Ni'matullah Salihi-Najafabadi, dalam karyanya yang berjudul :

Vilayat-i Faqih Hukumat-i Salihan (“Perwalian Faqih : Pemerintahan orang-orang shalih”).⁴⁹

Ayatullah Salihi mengajukan suatu *konteks baru* dari doktrin *Wilayah Faqih* meskipun ia mengakui proses pemahaman masyarakat terhadap faqih tertinggi (the *suprem faqih*) sebagai elemen utama bagi validitas kekuasaan faqih, tetapi ia juga menyodorkan apa yang disebut sebagai konteks *insa’i* (“kongkrit”) bagi aplikasi dan implementasi doktrin *Wilayah Faqih*, yang sebelumnya lebih didasarkan pada konteks *khabari* (“abstrak”) atau premis-premis teoritis.⁵⁰

Interpretasi baru yang ditawarkan Salihi itu, sebagaimana ditegaskan :

“Sifat yuridis Wilayah merupakan suatu *kontrak sosial* antara rakyat dan faqih yang dipercaya. Dalam rangka mendekatkan kepentingan dan peranan rakyat dengan lembaga pemegang kekuasaan hukum, perlu dipadukan antara prinsip-prinsip pemerintahan Islam dengan konsep-konsep *modern* seperti *pemerintahan mayoritas*, *kontrak sosia* dan *perwakilan* (representasi). Salah satu perwujudan dari *kontrak sosial* itu adalah melalui *bai’at* antara rakyat dan pemimpin (faqih). Tetapi *bai’at* di sini harus ditafsirkan secara *dua arah*; bukan hanya rakyat yang wajib mentaati pemimpin, tetapi juga sebaliknya. *Bai’at* semacam ini mempunyai konsekwensi adanya kewajiban yang sama, baik bagi rakyat maupun bagi pemimpin”.⁵¹

⁴⁹ Sihbudi, *Biografi*, h.143.

⁵⁰ *Ibid.* h.143.

⁵¹ *Ibid.*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tidak jelas, apakah interpretasi Salihi ini bisa diterima atau belum. Tetapi melihat proses dan pelaksanaan pemilu yang baru lalu, tampaknya tawaran seperti ini sudah terakomodasikan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ayatullah Khomeini adalah seorang Ulama Syi'ah yang sangat kharismatis, bahkan Ayatullah Khomeini adalah seorang teoritikus kontemporer yang memakai konsepsi negara merupakan otoritasnya para faqih. Pengaruh kharismaniknya mengakar sampai kebijakan yang ia lakukan terhadap pemerintahan Syah. Dalam pemikiran Khomeini sesungguhnya tiada lain kecuali turunnya Syah Iran dari tampuk kekuasaannya dan menggantikan dasar negara sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini memakan waktu yang sangat panjang sekali dalam karir politiknya. Dari pemikirannya ini melahirkan karyanya yang sangat fenomenal yang telah memberikan *blue print* bagi masyarakat Iran yakni "*Hukumat-i Islami : Vilayat-i Faqih*". Setelah digulingkannya Syah Iran, dengan demikian konsepsi *Vilayat-i Faqih (Wilayah Faqih)* tersebut, diterapkan dalam negara Republik Islam Iran yang tertuang dalam konstitusi. Masuknya Wilayah Faqih dalam konstitusi Iran merupakan prakarsa Ayatullah Khomeini ; "Bapak Revolusi Islam Iran "

B. Saran - saran

Skripsi yang ada di tangan pembaca ini, merupakan kajian yang jarang diminati oleh para mahasiswa Islam. Hanya awal-awal Revolusi saja banyak dikaji terhadap pandangan politiknya, sementara sangat terbatas sekali karya pemikiran politik Khomeini yang ditulis pemikir-pemikir lainnya di Indonesia. Kalaupun ada hanya sebatas pengenalan terhadap sosok Ayatullah Khomeini.

Oleh sebab itu, penelusuran terhadap karya Ayatullah Khomeini tentang politik yang belum dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini, akan banyak memberikan kontribusi dalam memahami lebih jauh politik politiknya, terutama yang berkaitan langsung dengan pandangan orang tentang politik .

C. Penutup

Akhirnya kritik dan saran yang sifatnya positif, konstruktif demi perbaikan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dan penyempurnaan karya tulis ini di masa mendatang, merupakan investasi amal saleh yang akan diterima dengan senang hati. Mudah-mudahan skripsi ini mempunyai nilai tambah baik bagi penulis sendiri maupun bagi kalangan akademis pada umumnya .

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. 1996. *Aliran Politik Dan Aqidah Dalam Islam*. Abd. Rahman dan Ahmad Qorib (Pent.). Jakarta: Logos.
- Ahmad, Mumtaz (ed). 1993. *Masalah-masalah Teori Politik Islam*. Ena Hadi (Pent.). Bandung: Mizan.
- Ahmed, Akbar S. 1992. *Citra Muslim Tinjauan Sejarah Dan Sosiologi*. Nunding Ram dan Ramli Jakub (Pent.). Jakarta: Erlangga.
- al-Filayaini, Mustafa. 1984. *Jami' al-Durus al-'Arabiyah*. Beirut: al-Maktabah al-Misriyah.
- al-Hasyimi, Muhammad Kamil. 1989. *Hakikat Aqidah Syi'ah*. M. Rasyidi (Pent.). Jakarta: Bulan Bintang.
- Algar, Hamid - Robin W. Carlesen. 1995. *Mata Air Kecemerlangan*. Zainal Abidin (Pent.). Bandung: Mizan.
- Anis, Ibrahim et-al. Tth. *Al-Mujam al-Wasith vol. II*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Arjomand, Said Amir (ed). 1988. *Authority And Political Culture In Shi'ism*. Al-Bany: State University of New York Press.
- asy-Syak'ah, Mustafa. 1995. *Islam Tidak Bermadzab*. A.M. Basalamah (Pent.). Jakarta: Gema Insani Press.
- Azzam, Salim (ed). 1990. *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*. Malikul Awal dan Abu Jalil (Pent.). Bandung: Mizan.
- Burrel, RM. (ed). 1997. *Fundamentalisme Islam Dan Modernitas*. Yudion W. Asmin (Pent.). Jakarta: Rajawali Press.
- Dasuki, A. Hafizh (dkk). 1994. *Ensiklopedi Islam Vol. II, III, V*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Enayat, Hamid. 1988. *Reaksi Politik Sunnah Dan Syi'ah*. Asep Hikmat (Pent.). Bandung: Pustaka.

Esposito, John L. 1987. *Dinamika Kebangunan Islam*. Bakri Siregar (Pent.). Jakarta: Rajawali Press.

-----1994. *Ancaman Islam Mitos Atau Realitas?*. Alwiyah Abdurrahman (Pent.). Bandung: Mizan.

-----1995. *Islam Dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-masalah*. Machnun Husein (Pent.). Jakarta: Rajawali Press.

Ezzati, A. 1990. *Gerakan Islam Sebuah Analisa*. Agung Sulistiyadi (Pent.). Jakarta: Pustaka Hidayah.

Harianto. 1982. *Sistim Politik Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberti.

Hasan, Ahmed. 1994. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*. Agah Garnedi (Pent.). Bandung: Pustaka.

Jafri, S.H.M. 1995. *Awal Dan Sejarah Perkembangan Syi'ah Dari Saqifah Sampai Imamah*. Bandung: Pustaka Hidayah.

Khomeini. Tth. *Al-Hukumah al-Islamiyah*, Najaf: Tp.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Lapidus, Ira M. 1999. *Sejarah Sosial Umat Islam vol 3*. Gufron A. Mas'adi (Pent.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Lewis, Bernard. 1994. *Bahasa Politik Islam*. Ihsan Ali Fauzi (Pent.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ma'luf, Louis. 1973. *Al-Munjid*. Beirut: Dar al-Masyriah.

Glasse, Cyril, 1996, *Ensiklopedi Islam Ringkas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Miskhini, Ali. 1991. *Wali Faqih Ulama Pewaris Nabi*. Muslim Arbi (Pent.). Jakarta: Risalah Massa.

Momen, Moojan. 1995. *An Introduction To Shi'i Islam : The History And Doctrine Of Twelever Shi'ism*. New Haven: Yale University Press.

Morgan, Kenneth W. (ed). *Islam Jalan Lurus*. Abu Salamah dan Drs. Chaidar Anwar (Pent.). Jakarta: Pustaka Jaya.

Mortimer, Edward. 1984. *Islam Dan Kekuasaan*. Ena Hadi Dan Rahmani Astuti (Pent.). Bandung: Mizan.

Munawar, Budhy - Rahman (ed). 1995. *Kontektualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina.

Musawi, Ahmad. 1986. *Dialog Sunnah Syi'ah*. Bandung: Mizan.

Muthahhari, Murtadha. 1991. *Kepemimpinan Islam*. Husain al-Habsyi (Pent.). Gua Hira': Banda Aceh.

-----1418 H. Wilayah; Konsep Kepemimpinan Dalam Islam. *Wans* no.12. (Rabiul Akhir-Jumadil Akhir).

Nasution, Harun. 1985. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta; UI Press.

----- (dkk), 1992. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambata.

Noer, Deliar. 1983. *Pengantar Ke Pemikiran Politik*. Jakarta: Rajawali.

Notosusanto, Nugroho. 1987. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Idayu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Pulungan, Suyuthi. 1994. *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Perkembangan*. Jakarta: Rajawali Press.

Rahman, Fazlur. 1992. *Metode Dan Alternatif; Neo-modernisme Islam*. Bandung: Mizan.

Rahmat, Jalaluddin. 1998. *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan.

Rahnema, Ali (ed). 1990. *Para Perintis Zaman Baru Islam*. Ilyas Hasan (Pent.). Bandung: Mizan.

Rais, M. Amin. 1997. *Cakrawala Islam Antara Cita Dan Fakta*. Bandung: Mizan.

Sachedina, Abdul Azis A. 1994. *Kepemimpinan Dalam Islam Perspektif Syi'ah*. Ilyas Hasan (Pent.). Bandung: Mizan.

Sihbudi, Riza. 1989. *Dinamika Revolusi Islam Iran*. Jakarta: Pustaka Hidayah.

————— 1992. Politik, Partai Dan Oposisi Di Iran. *Jurnal Ilmu Politik* vol. II. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

————— 1993. Tinjauan Teoritis Dan Praktis Atas Konsep Vilayat-i Faqih Sebuah Studi Pengantar. *Ulumul Qur'an* no. 2 vol. IV.

————— 1994. Bahasa Politik Dalam Syi'ah; Kasus Vilayat-i Faqih. *Islamik* no. 5 (Juli - September).

————— 1995. *Profil Negara-negara Timur Tengah*. Jakarta: Pustaka Jaya.

————— 1996. *Biografi Politik Imam Khomeini*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam Dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.

Syafi'i, Ino Kencana. 1997. *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Thabataba'i, M.H. 1996. *Intisari Islam, Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam Secara Mudah*. Ahsin Muhammad (Pent.). Bandung: Pustaka Hidayah.

Voll, John Obert. 1997. *Politik Islam Kelangsungan Dan Perubahan Di Dunia Modern*. Ajat Sudrajat (Pent.). Yogyakarta: Titian Ilahi Press.

Watt, William Montgomery. 1997. *Fundamentalisme Islam Dan Modernitas* Taufik Adnan Amal (Pent.). Jakarta: Raja Grafindo Persada